

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA TERNATE**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Keuangan**

Disusun Oleh :

WINDA AYU DYANITA

NIM. 500661438

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRAK

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PDAM KOTA TERNATE

Winda Ayu Dyanita
Windyan18@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Penelitian ini bertujuan menganalisis laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate periode 2014-2015. Laporan keuangan sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemilik perusahaan, pemasok, investor, pegawai, pemerintah (pajak). Agar laporan keuangan dapat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan maka perlu mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos-pos dalam suatu laporan keuangan. Dalam hal ini analisa rasio dapat dipakai dalam memberikan gambaran keadaan keuangan yang sebenarnya mengenai perkembangan perusahaan dan sehat tidaknya perusahaan tersebut melakukan usahanya. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode pelaksanaan menggunakan metode studi kasus. Macam data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan PDAM Kota Ternate periode 2014-2015. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi kasus, dan literatur. Teknik pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kemendagri N0. 47 Tahun 1999. Dalam pedoman tersebut, digunakan 3 aspek untuk menilai kinerja manajemen yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dalam menilai kinerja aspek keuangan PDAM kota Ternate, digunakan 10 indikator rasio keuangan yaitu Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif, Rasio Laba terhadap Penjualan, Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar, Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas, Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang, Rasio Biaya Operasi terhadap pendapatan Operasi, Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo, Rasio Aktiva Produktif, Rasio Jangka Waktu Penagihan Piutang, dan Rasio Efektivitas Penagihan. Indikator rasio menggunakan skala nilai antara 1 sampai dengan 5.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Analisis Rasio.

ABSTRACT

ASSESSMENT FINANCIAL PERFORMANCE OF TERNATE LOCAL WATER COMPANY

Winda Ayu Dyanita
Windyan18@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aimed to analyze the financial statements of the Regional Water Company (PDAM) Kota Ternate period 2014-2015. The financial statements are very significant for the parties concerned, eg the owner of the company, suppliers, investors, employees, government (taxes). So that the financial statements may mean for the parties concerned, the need to conduct analysis of the relationship of the various items in a financial statement. In this case the ratio analysis can be used to provide a picture of the actual financial and healthy development of the company about whether the company conducts its business. The basic method used in this research is descriptive method. The method of implementation using the case study method. Kinds of data used are secondary data from the financial statements PDAM Ternate period of 2014-2015. Data collection techniques by observation, interviews, case studies, and literature. Financial performance measurement techniques based Kemendagri N0. 47 of 1999. In these guidelines, used 3 aspects to assess the performance of management namely financial aspects, operational aspects, and administrative aspects. In assessing the performance of the financial aspects of water company in Ternate, used 10 indicators of financial ratios Return on Assets, Ratio Profit to Sales Ratio Current Assets against Debts Fluent, Ratio of Long-Term Debt to Equity Ratio of Total Assets to Total Debt, Ratio of Operating Costs on revenue of Operations, ratios Operating Profit before Depreciation Cost of the installment of Principal and Interest Maturity, Productive Assets ratio, ratio Term Billing Accounts Receivable and Billing Effectiveness ratio. Ratio indicator uses a scale of values between 1 to 5.

Keywords : Financial Reports, Ratio Analysis.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Ternate
Penyusun TAPM : Winda Ayu Dyanita
NIM : 500661438
Program Studi : Magister Manajemen Bidang Minat Keuangan
Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,



(Dr. Etty Puji Lestari, M.Si)

Pembimbing I,



(Dr. Marwan, S.E., M.Si)

Penguji Ahli

(Dr. Ari Purwanti, AK., CA)

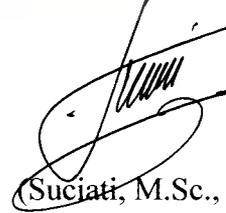
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Manajemen
Program Studi Keuangan



(Mohamad Nasoha, SE., M.S)

Direktur
Program Pascasarjana



(Suciati, M.Sc., Ph.D)

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

PENGESAHAN

NAMA : WINDA AYU DYANITA
 NIM : 500661438
 PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN BIDANG MINAT
 KEUANGAN
 JUDUL TAPM : PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA TERNATE

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Manajemen Bidang Minat Keuangan Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016

Waktu : 13.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji:
 Nama :  Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli
 Nama :  Dr. Ari Purwanti, AK, CA

Pembimbing I
 Nama :  Dr. Marwan, S.E, M.Si

Pembimbing II
 Nama :  Dr. Etty Puji Lestari, M.Si

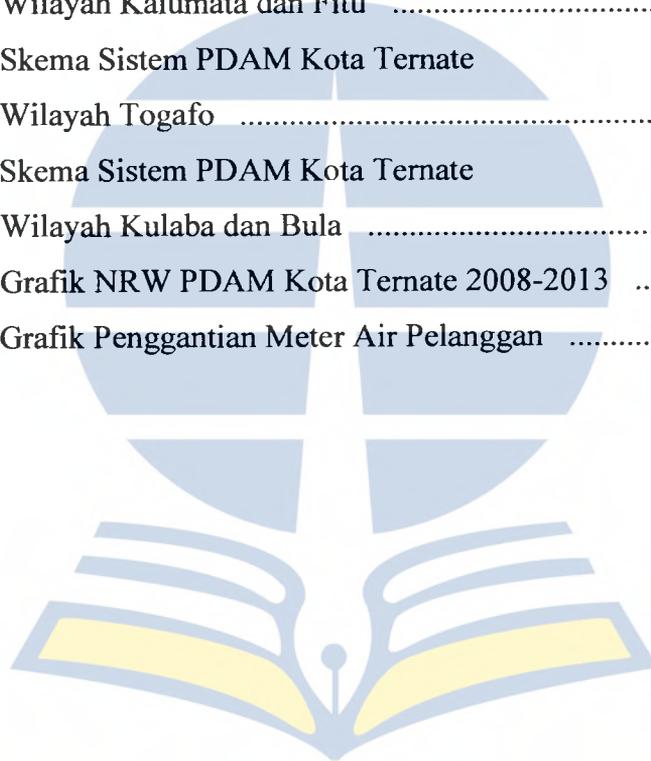
Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
Bab II. Tinjauan Pustaka	13
2.1. Kajian Teori	13
2.1.1. Kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum	13
2.1.2. Kinerja	18
2.1.2.1. Penilaian Kinerja	20
2.1.2.2. Tujuan Penilaian Kinerja	21
2.1.2.3. Manfaat Penilaian Kinerja	22
2.1.2.4. Fungsi Penilaian Kinerja	26
2.1.3. Kinerja Keuangan	27
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Pemikiran	40

Bab III. Metodologi Penelitian	42
3.1. Desain Penelitian	42
3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian	43
3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.2. Metode Pengumpulan Data	43
3.3. Jenis dan Sumber Data	43
3.4. Metode Analisis Data	44
3.4.1. Metode Pengumpulan Data	44
3.4.2. Definisi Operasional	48
Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
4.1. Gambaran Umum PDAM	50
4.1.1. Sejarah Singkat PDAM	50
4.1.2. Visi dan Misi	51
4.1.3. Data Umum PDAM	51
4.1.4. Data Teknis PDAM	53
4.2. Kondisi Keuangan PDAM	62
4.3. Pembahasan Analisa Rasio Keuangan.....	62
Bab V. Penutup	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	102
Daftar Pustaka	
Daftar Gambar	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	41
Gambar 3.1. Desain Penelitian	42
Gambar 4.1. Cakupan Pelayanan PDAM Kota Ternate	54
Gambar 4.2. Skema Sistem PDAM Kota Ternate Wilayah Kalumpang dan Skeep	54
Gambar 4.3. Skema Sistem PDAM Kota Ternate Wilayah Kalumpang dan Skeep	56
Gambar 4.4. Skema Sistem PDAM Kota Ternate Wilayah Akegaale	57
Gambar 4.5. Skema Sistem PDAM Kota Ternate Wilayah Kalumata dan Fitu	59
Gambar 4.6. Skema Sistem PDAM Kota Ternate Wilayah Togafo	60
Gambar 4.7. Skema Sistem PDAM Kota Ternate Wilayah Kulaba dan Bula	61
Gambar 4.8. Grafik NRW PDAM Kota Ternate 2008-2013	87
Gambar 4.9. Grafik Penggantian Meter Air Pelanggan	94



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2015	6
Tabel 1.2. Kontribusi Laba PDAM terhadap PAD Kota Ternate	8
Tabel 3.1. Jenis dan Skor Rasio Keuangan	44
Tabel 3.2. Klasifikasi Kinerja Keuangan PDAM	47
Tabel 4.1. Data Sambungan Pelanggan PDAM	52
Tabel 4.2. Rekapitulasi Nilai dan Bobot Kinerja PDAM Kota Ternate ..	62
Tabel 4.3. Penilaian Tingkat Keberhasilan PDAM Kota Ternate Periode 2014-2015	63
Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	64
Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Rasio Laba terhadap Penjualan	66
Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar	67
Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas	69
Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Total Aktiva	70
Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	71
Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	73
Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	74
Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Rasio Jangka Waktu Penagihan	75
Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Penagihan	77
Tabel 4.14. Perbandingan Nilai Rasio Tahun 2014 Dengan Nilai Rujukan	78
Tabel 4.15. Perbandingan Nilai Rasio Tahun 2015 Dengan Nilai Rujukan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Seiring dengan penambahan penduduk, kebutuhan akan air bersih pun semakin meningkat. Sementara ketersediaan air bersih tidak dapat mengimbangi peningkatan pertumbuhan penduduk. Ketersediaan air bersih semakin menurun dari tahun ke tahun akibat eksploitasi yang dilakukan oleh penduduk dan meluasnya areal pemukiman yang mengekspansi areal hutan sebagai areal resapan air yang berfungsi sebagai cadangan air tanah. Konsumsi air bersih rumah tangga ikut ambil bagian dalam eksploitasi sumber daya air.

Di seluruh dunia, kira-kira 20 negara, hampir semuanya di kawasan negara berkembang, memiliki sumber air yang dapat diperbarui hanya di bawah 1.000 meter kubik untuk setiap orang, suatu tingkat yang biasanya dianggap kendala yang sangat mengkhawatirkan bagi pembangunan, dan 18 negara lainnya memiliki di bawah 2.000 meter kubik untuk tiap orang. Penduduk dunia yang pada 2006 berjumlah 5,3 miliar diperkirakan akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025 akan didera oleh ketersediaan air bersih. Laju angka kelahiran

yang tertinggi justru terjadi tepat di daerah yang sumber-sumber airnya mengalami tekanan paling berat, yaitu di negara-negara berkembang.

Berbagai kegiatan manusia, meliputi kegiatan budidaya pertanian, pengadaan air baku untuk keperluan air minum maupun industri, aktivitas perkotaan, pembangkit tenaga listrik tenaga air, perikanan, pariwisata, dan lain-lain, memerlukan sumber daya air yang cukup untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan tersebut. Apabila air tersedia terlalu banyak akan menimbulkan banjir, dan sebaliknya apabila terlalu sedikit akan menimbulkan kekeringan, terlebih lagi jika air yang jumlahnya sudah sedikit itu tercemar, maka dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan dan lingkungan.

Kondisi ini akan menghambat proses tumbuh dan berkembangnya kegiatan kehidupan manusia bahkan makhluk hidup lainnya, dan memberikan indikasi bahwa sistem lingkungan telah mengalami kerusakan (berkurangnya luasan hutan, tingkat sedimentasi dan pembuangan limbah yang tak terkendali). Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan lebih banyak orang yang mati disebabkan oleh kekurangan air bersih setiap tahunnya dibandingkan perang. Badan lingkungan hidup PBB melaporkan sebanyak 3,7% dari semua kematian di dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan air.

Karena demikian pentingnya air untuk kelanjutan hidup orang banyak, keberadaan air telah dijamin oleh konstitusi, yakni pada Pasal 33 UUD 1945, ayat 3 yang berbunyi : "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Dalam PP Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air, pada Pasal 2 ayat (1): Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pasal 3: Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai perwujudannya, penyediaan sebagian besar kebutuhan air bersih di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. PDAM bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek, serta bernegosiasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dengan cara menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi

masyarakat yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 690-069 tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Pengelolaan PDAM, ditegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat di mana dalam menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya. Di samping itu, PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Tujuan tersebut di atas dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi PDAM dalam menjalankan organisasinya. Pada kenyataannya, PDAM mengalami beberapa kendala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut data pada tahun 2015 dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (BPPSPAM), PDAM sebagai penyelenggara utama pelayanan air bersih/air minum di Indonesia saat ini berjumlah 368 PDAM dengan jumlah sambungan sekitar lebih dari 4,5 juta dan kapasitas produksi kurang lebih sebesar 95.000 liter/detik, PDAM seluruh Indonesia hanya mampu melayani 43% penduduk perkotaan. Jumlah itupun sudah termasuk kehilangan air yang disebabkan kebocoran jaringan distribusi sebesar 40%. Dengan kemampuan PDAM yang masih terbatas, sebagian besar warga perkotaan maupun pedesaan belum tersentuh pelayanan PDAM.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan daerah yang mewarisi PDAM dari Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pengarahannya kebijakan dan

monitoring pengelolaan PDAM. Fungsi ini selama ini terlihat belum dijalankan secara maksimal. Sebagai perusahaan daerah, PDAM berkewajiban menyetorkan 55% dari keuntungan bersihnya kepada kas daerah. Tergantung pada kebijakan masing-masing daerah, setoran tersebut ada yang ditanamkan kembali untuk investasi sarana air minum tetapi ada juga yang tidak. Pemerintah Daerah terkesan masih tidak peduli dengan kondisi PDAM meskipun secara berkesinambungan menikmati setoran PDAM tersebut. Seharusnya fungsi pemilik sebagai pengarah kebijakan dan pengawas dijalankan dengan baik dan ada keinginan politik untuk membantu PDAM mengingat fungsi PDAM yang strategis sebagai penyedia air bersih.

Dari kasus-kasus yang diteliti oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hanya sedikit daerah yang menjalankan fungsi ini dengan baik termasuk dalam bidang keuangan dengan adanya inisiatif untuk membayar hutang PDAM. Selain itu, kebijakan penentuan tarif air minum juga sering digunakan sebagai alat politik sehingga penjualan air minum sering berada pada tingkat di bawah biaya produksi.

Selain masalah di atas, penyebab lain yang dapat mengakibatkan belum maksimalnya kinerja PDAM adalah jumlah pelanggan yang mempengaruhi pendapatan. Bila jumlah pelanggan rendah, otomatis pendapatan juga akan rendah. Biaya operasional juga akan menjadi tidak efisien. Ada beberapa penyebab jumlah pelanggan rendah, yakni produksi air bersih yang rendah karena tidak efisien atau tidak ada investasi, minat berlangganan yang rendah karena banyak sumber air bersih lain, hingga pemekaran wilayah. Pada tahun 2013,

kondisi pelayanan air minum di Indonesia secara nasional sudah mencapai 67,73 %, dengan rincian 79,34% di perkotaan, dan 56,17% di pedesaan.

Masalah utama lain yang tidak kalah penting adalah karena tidak efisiennya kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melakukan pengeluaran dengan biaya yang tinggi padahal pemanfaatan energi yang efisien menjadi isu penting. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan PDAM adalah dengan melakukan efisiensi biaya listrik karena biaya energi yang digunakan umumnya mencapai 20 hingga 30% dari total biaya operasional PDAM. Tingginya biaya energi ini berdampak pada peningkatan biaya produksi dan biaya distribusi pelayanan air minum serta tingginya tarif air minum.

Menurut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (BPPSPAM), klasifikasi Kinerja PDAM dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori sehat, kurang sehat, dan sakit. Pembagian klasifikasi ini didasarkan pada hasil perhitungan kinerja keuangan PDAM berdasarkan Kepmendagri no. 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum. Pada umumnya kinerja PDAM belum memenuhi standar dan masih banyak yang berada dalam kondisi “sakit”. Hingga akhir 2015, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sehat di Indonesia masih berada di angka 196, PDAM Kurang Sehat 100, dan PDAM Sakit ada 72. Berikut adalah tabel hasil evaluasi kinerja PDAM Tahun 2015.

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2015

Kategori	Jumlah PDAM	Prosentase
Sehat	196	53%

Kategori	Jumlah PDAM	Prosentase
Kurang Sehat	100	27%
Sakit	72	20%

Sumber: Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (BPPSPAM)

PDAM sakit di Indonesia didominasi oleh PDAM dengan tingkat kebocoran air diatas 40%. Sementara PDAM Sehat umumnya memiliki tingkat kebocoran air antara 20 hingga 30%. Hal tersebut dikarenakan air yang seharusnya terjual dan menjadi uang, malah terbuang percuma.

Selain itu, salah satu yang menjadi sorotan terhadap PDAM adalah banyaknya PDAM yang mempunyai beban utang sebanyak 90% dari total PDAM yang ada di Indonesia. Hal ini diketahui dari pernyataan pemerintah yang akan segera memprivatisasi sekitar 80 hingga 90% dari sekitar 300-an PDAM di Indonesia yang masuk kategori. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena kebanyakan PDAM membiayai pengembangan dari dana hibah pemerintah dan pinjaman konsesi, dan sangat sedikit sekali yang sanggup mendanai dengan dana sendiri. Permasalahan kerugian PDAM juga menjadi permasalahan pokok dalam pencapaian laba.

Pada tahun 2005, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku mencatat kerugian PDAM Kabupaten Halmahera Barat mencapai Rp. 1.598.287.004,93 dan pada tahun 2006 rugi sebesar Rp. 1.780.114.456.05. Pada tahun 2007, PDAM Kabupaten Halmaherah Barat diambil alih oleh Pemerintah Kota Ternate. Dengan kondisi perusahaan yang menanggung kerugian tersebut, PDAM belum mampu untuk mewujudkan tujuan PDAM yaitu

memberikan sumbangan pembangunan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai data pendukung untuk mengetahui kondisi keuangan PDAM Kota Ternate pada masa lalu, berikut ditampilkan dalam tabel 1.1 mengenai kontribusi laba PDAM terhadap kota Ternate.

Tabel 1.2. Kontribusi Laba PDAM terhadap PAD Kota Ternate

Tahun	Laba (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2005	(1.598.287.004)	14.675.889.175,00	0
2006	(1.780.114.456)	16.782.982.166,00	0
2007	(2.610.376.775)	18.386.287.226,19	0
2008	(1.185.548.961)	23.110.024.748,00	0
2009	3.968.941.120	23.142.612.230,00	17,5

Sumber: Laporan olahan PDAM tahun 2011

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas, terlihat jelas bahwa dari tahun 2005-2008 PDAM mengalami kerugian sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Ternate. Pada tahun 2009 PDAM menghasilkan laba sebesar Rp. 3.968.941.120 dan memberikan kontribusi sebesar 17,15%. Nilai kontribusi laba terhadap PAD Kota Ternate masih rendah karena masih menanggung hutang jangka panjang dan belum stabilnya kinerja PDAM Kota Ternate. Kontribusi laba PDAM terhadap PAD Kota Ternate setelah tahun 2009 hingga sekarang tidak dapat ditemukan dalam arsip sehingga tidak bisa di sajikan dalam penelitian ini.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, perlu adanya suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan PDAM apakah baik atau buruk. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan PDAM adalah

dengan penilaian kinerja. Dengan adanya penilaian kinerja, diharapkan manager dapat menganalisis, memprediksi masalah-masalah dan mencari bagaimana solusinya atau menyiapkan rencana guna meningkatkan performa baik itu dari segi pemasukan atau pelayanan PDAM sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud dengan baik.

Menurut Mulyadi (2001), Penilaian kinerja yang paling mudah dan umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional yaitu pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan perusahaan saja. Namun, pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan tradisional tersebut juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain tidak berorientasi pada keuntungan jangka panjang melainkan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Kelemahan lain dari pendekatan ini adalah ketidakmampuan di dalam mengukur kekayaan-kekayaan perusahaan yang sifatnya tidak berwujud maupun kekayaan intelektual (sumber daya manusia).

Saat ini, hampir seluruh PDAM di Indonesia menggunakan penilaian kinerja untuk mengetahui keadaan perusahaan termasuk PDAM kota Ternate. Sama seperti PDAM pada umumnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Ternate merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih. Penilaian kinerja pada PDAM kota Ternate sebagai BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai. Hanya perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat global yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu menghasilkan produk yang bermutu serta *cost effective* (Mulyadi,2001).

Penilaian kinerja PDAM kota Ternate berdasar pada pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang terdiri dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Pada penulisan ini, penulis lebih spesifik menilai kinerja dari aspek keuangan yang terdiri dari rasio kemampuan laba, rasio lancar, rasio hutang, rasio kemampuan aktiva, dan kemampuan solvabilitas perusahaan.

Menurut Munawir (2000), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sabagai berikut:

1. Diperlukan sarana pendukung seperti penilaian kinerja untuk mengetahui baik atau tidaknya kondisi PDAM kota Ternate
2. Penilaian kinerja keuangan sebagai salah satu tolak ukur yang efektif untuk mengetahui kondisi keuangan PDAM kota Ternate.

Dan mengacu pada latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan PDAM kota Ternate?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PDAM kota Ternate dengan cara menghitung tingkat keberhasilan aspek keuangan PDAM kota Ternate berdasarkan pada peraturan Kepmendagri no. 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum di kota Ternate.
- 2) Menambah pengetahuan dalam perhitungan analisis rasio kinerja keuangan untuk mengetahui dan menentukan tingkat keberhasilan aspek keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum kota Ternate berdasarkan Kepmendagri no.47 tahun 1999.

- b. Bagi ilmu pengetahuan
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi peneliti lain yang sedang melakukan penelitian dibidang analisis rasio keuangan.
 - 2) Menambah kepustakaan tentang penerapan sistem yang dapat membantu mengukur kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- c. Bagi organisasi / karyawan
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Ternate agar mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang masuk dalam kategori “kurang sehat” melalui analisis penilaian kinerja keuangan sehingga dapat mencari solusi guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
 - 2) Menjadi bahan masukan kepada karyawan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih tanggap terhadap pengaduan masyarakat dan teratur melakukan pengecekan/ maintenance secara rutin dan berkala pada pipa saluran air guna menghindari kebocoran air yang cukup banyak sehingga tujuan perusahaan yang sehat baik dari segi pendapatan maupun sumber daya manusia bisa tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kinerja

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan suatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi/ perusahaan. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Mangkunegara (2004), Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara (2004) mengungkapkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk penilaian kinerja yang dikelompokkan menjadi kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan, dan sikap.

- a. Kualitas kerja (*Quality*), sejauhmana kemampuan menghasilkan sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan organisasi.

- b. Kuantitas kerja (*Quantity*), sejauhmana kemampuan menghasilkan sesuai dengan jumlah standar yang ditetapkan organisasi.
- c. Keandalan (*Reliabilty*), sejauhmana tingkat penerapan sumberdaya manusia, keuangan, teknologi, dan material yang mampu dioptimalkan.
- d. Sikap (*attitude*), sejauhmana tingkatan seorang pegawai dalam pemeliharaan sikap, harga diri, nama baik dan kerjasama, diantara rekan kerja dan bawahan.

Menurut Hasibuan (2001), kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Menurut Rivai (2004), kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi.

2.1.1.1 Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode sciring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan suatu dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Mulyadi, 2001). Sedangkan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi,

bagian organisasi dan personelnnya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka pengukuran kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi (Mulyadi,2001). Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja dengan memberikan penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu yang objektif dan dilakukan secara berkala

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, penilaian prestasi adalah merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.

Dalam praktiknya, istilah penilaian kinerja (*performance appraisal*) dan evaluasi kinerja (*performance evaluation*) dapat digunakan secara bergantian atau bersamaan karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian kinerja digunakan organisasi untuk menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Dari beberapa pengertian di atas terdapat perbedaan yang mendasar tentang penilain kinerja.

Ada pengertian yang mengatakan memposisikan karyawan pada pihak subordinat dan dikendalikan, sebaliknya ada pemahaman bahwa karyawan dianggap sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif. Sedangkan yang lain ada pengertian bahwa karyawan diposisikan sebagai aset utama organisasi, karyawan harus dipelihara dengan baik dan diberi kesempatan berkembang.

2.1.1.2 Tujuan penilaian kinerja

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Dengan adanya penilaian kinerja, manajemen puncak dapat memperoleh dasar yang objektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggung jawaban kepada perusahaan

secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

2.1.1.3 Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Mulyadi (2001), Penilaian kinerja dimanfaatkan manajemen untuk berbagai tujuan antara lain :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum. Dalam mengelola perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan dicapai beserta langkah-langkah pencapaiannya dalam sebuah perencanaan. Dalam pelaksanaan perencanaan, manajemen menetapkan pengendalian yang efektif. Pelaksanaan rencana dapat ditempuh dengan tangan besi yang dapat menjamin pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan efisien namun pencapaian ini akan disertai dengan rendahnya moral karyawan. Kondisi moral karyawan yang demikian tidak akan terjadi apabila pengelolaan perusahaan didasarkan atas memaksimalkan motivasi karyawan. Motivasi akan membangkitkan dorongan dalam diri karyawan untuk menggerakkan usahanya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, mutasi, atau pemutusan hubungan kerja permanen. Data hasil evaluasi kinerja yang diserahkan secara periodik akan sangat membantu memberikan informasi penting dalam mempertimbangkan keputusan tersebut. Mengidentifikasi kebutuhan pelathan dan pengembangan karyawan dan untuk

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Organisasi memiliki suatu keinginan untuk mengembangkan karyawan selama masa kerjanya agar karyawan selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dan perkembangan bila perusahaan tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan yang dimilikinya. Hasil penilaian kinerja dapat menyediakan kriteria untuk memilih program pelatihan karyawan dengan kebutuhan karyawan.

3. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan akan menilai. Dalam organisasi perusahaan, biasanya manajemen akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen dibawah mereka disertai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan wewenang tersebut. Penggunaan wewenang dan konsumsi sumber daya itu dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja.
4. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Penghargaan ini digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu:
 - a. Penghargaan intrinsik berupa puas diri yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tersebut.
 - b. Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan baik berupa kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung atau yang berupa kompensasi non keuangan dimana ketiganya memerlukan data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang mempunyai kinerja baik.

Rivai (2005) mengatakan, manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah (1) orang yang dinilai (karyawan); (2) penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manajer, konsultan); dan (3) perusahaan.

a. Manfaat bagi Karyawan yang Dinilai

Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja adalah antara lain:

1. Meningkatkan motivasi
2. Meningkatkan kepuasan kerja
3. Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka
4. Umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif
5. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar
6. Pengembangan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dengan membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin
7. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas
8. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi
9. kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana mereka dapat mengatasinya

b. Manfaat bagi Penilai (supervisor/manajer/penyelia).

Bagi penilai, manfaat pelaksanaan penilaian kinerja adalah antara lain:

1. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaiki manajemen selanjutnya.
2. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap.
3. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri, maupun pekerjaan dari bawahannya identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi peningkatan kepuasan kerja.

c. Manfaat bagi perusahaan/organisasi

Bagi perusahaan/organisasi, manfaat penilaian adalah antara lain :

1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan/organisasi karena.
2. Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan/organisasi dan nilai budaya perusahaan/organisasi.
3. Meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas.
4. Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer/pimpinan untuk menggunakan ketrampilan atau keahlian memimpinya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan ketrampilan karyawannya.
5. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan.
6. Meningkatkan kualitas komunikasi

7. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan
8. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan/organisasi.

2.1.1.4 Fungsi Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah suatu proses di mana organisasi mengadakan evaluasi atau menilai prestasi kerja karyawannya Handoko (1994). Sebenarnya tidak ada suatu hal yang mewajibkan tiap-tiap organisasi untuk memiliki penilaian kinerja. Tetapi dengan melihat fungsi penilaian yang begitu besar, maka hampir semua organisasi dimanapun mempunyai sistem penilaian kinerja.

Fungsi diadakannya penilaian kinerja disetiap organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggajian
2. Sebagai dasar umpan balik atas kinerja yang dilakukan seseorang atau kelompok
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang dinilai
4. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan promosi
5. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan mutasi dan pemberhentian
6. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan training dan pengembangan
7. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan penghargaan (*reward*)
8. Sebagai alat untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja

Dengan mengetahui banyak kegunaan atau fungsi dari adanya penilaian kinerja, maka bisa diketahui bahwa hasil penilaian kinerja bukanlah merupakan

tahap akhir, namun sebaliknya hasil penilaian hendaknya dapat digunakan sebagai dasar keputusan atau strategi organisasi.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh, maka ada beberapa pengertian kinerja seperti yang telah dijelaskan oleh Helfert (1996) bahwa "Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen".

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kinerja merupakan indikator dari baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungan intern maupun ekstern melalui informasi. Informasi tersebut lebih lanjut dituangkan atau dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja (*Performance*) perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat dari penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2000) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, yaitu merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Munawir (2000), Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang

kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan.

Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran atau tolok ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan rasio masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dan bentuk yang lain yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 menyatakan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keuangan BUMD dilampirkan bersama dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK) untuk diserahkan kepada kepala daerah.

Perhatian terhadap pengukuran kinerja keuangan PDAM menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja perusahaan harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja.

Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memiliki kaitan dengan konsep manajemen berbasis kinerja karena manajemen berbasis kinerja menghendaki perusahaan untuk membuat sistem akuntabilitas berbasis hasil (*result-based*

accountability system). Selain itu, pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan perusahaan.

Whittaker (2005) mendefinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, sistem pengukuran kinerja juga dapat membantu pengelola dalam memonitor *output actual* dengan sasaran dan tujuan strategis.

Terlepas dari ukuran, jenis, sektor, atau bidang garapnya, setiap organisasi cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut:

1. Aspek keuangan, merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode tertentu
2. Kepuasan pengguna, berhubungan dengan pelayanan dari perusahaan yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.
3. Operasi bisnis internal, melakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas operasi secara berkesinambungan serta prosedur pelayanan pada instansi pemerintah.
4. Kepuasan pegawai, sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan program kinerja pemerintah sehingga penting sekali untuk mengelola kepuasan pegawai karena apabila pegawai pemerintah puas dengan kinerjanya maka pemerintah akan dengan mudah melakukan inovasi-inovasi.

5. Kepuasan komunitas dan *stakeholders*. Informasi dari pengukuran kinerja juga didesain untuk mencapai kepuasan *stakeholder* yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan instansi pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan ada empat macam rasio keuangan yang biasa digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio efisiensi, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Pada rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban sekarang dengan tepat waktu. Rasio likuiditas mempunyai dua indikator yaitu *current ratio* dan *quick ratio*. *Quick ratio* dipandang lebih baik dibanding *current ratio* karena mempunyai tingkat kepastian yang lebih tinggi. *Current ratio* memasukkan semua elemen aktiva lancar padahal diketahui dalam elemen aktiva lancar terdapat elemen yang kurang likuid seperti persediaan. Yang kedua rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kecepatan perusahaan dalam memutar *account receivable*, *inventory*, dan asset jangka panjang. Dengan kata lain, rasio ini mengukur berapa kali per tahun perusahaan menjual persediaannya atau mengumpulkan keseluruhan *accounts receivable*-nya. Untuk asset jangka panjang, rasio ini mengukur seberapa *fixed asset* dapat menghasilkan/mewujudkan penjualan (Block, Hirt: 1999). Rasio dalam kategori ini sering disebut rasio efektivitas yang berguna untuk membantu analis menilai kinerja manajemen dalam mengelola dan mengawasi/mengendalikan asset. Rasio ini juga membantu menaksir berapa banyak modal yang diperlukan untuk mendukung penjualan (Viscione, Robert:

1996). Rasio efisiensi meliputi *inventory turnover* dan *total assets turnover*. Selanjutnya rasio *leverage* yang digunakan untuk mengukur penjaminan hutang baik dengan menggunakan total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini didesain untuk membantu menilai kemampuan perusahaan untuk membayar ketika kewajiban sudah jatuh tempo dan membantu menaksir kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman baru. Salah satu rasio yang masuk kategori *leverage* adalah *total debt to total assets*. Rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur perusahaan menghasilkan laba baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri. Rasio profitabilitas ini dapat membantu memperkirakan kinerja manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya serta mendapatkan *return* atas asset atau modal sendiri. Rasio profitabilitas mencakup *Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity*. Rasio-rasio dalam kategori ini didesain untuk membantu memperkirakan perusahaan mendapatkan pengembalian modal. Formula rasio-rasio profitabilitas antara lain *Profit Margin*($Operating\ Income / Sales$), *Return On Assets*($Net\ Income / Total\ Assets$), dan *Return on Equity*($Net\ Income / Equity$).

Sementara itu melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690-069 tahun 1994 diatur tentang pola petunjuk teknis PDAM antara lain:

1. PDAM mempunyai fungsi pokok pelayanan umum kepada masyarakat
2. PDAM harus mampu membiayai dirinya sendiri
3. PDAM harus mengembangkan tingkat pelayanannya

4. PDAM diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-327 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan untuk dapat mencapai tujuan tersebut diatas, maka penyelenggaraan dan pembinaan terhadap PDAM harus dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang sehat.

Lebih lanjut Agus Dwiyanto (2005) mengusulkan setidaknya-tidaknya ada lima indikator untuk menilai kinerja organisasi publik yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan efisiensi tetapi diperluas sehingga mencakup efektivitas pelayanan seperti seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan. Kualitas layanan berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Responsivitas menyangkut ukuran kinerja yang secara langsung menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan misi dan tujuannya. Keselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat merupakan ukuran untuk indikator ini. Sementara responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar baik yang implisit maupun yang eksplisit. Indikator ini diharapkan mengetahui apakah prosedur administrasi yang ada dalam organisasi mampu menjawab dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan

akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan perusahaan itu tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dengan asumsi bahwa pejabat tersebut selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

Sebagai Perusahaan Daerah, keberadaan institusi PDAM menyanggah misi sebagai organisasi pelayanan publik serta badan usaha milik daerah. Oleh karenanya, persoalan yang menyangkut penilaian kinerja tentunya sangat erat kaitannya dengan kedua misi tersebut.

Foster (2001) menyatakan empat hal yang mendorong analisis laporan keuangan dilakukan dengan model rasio keuangan yaitu:

1. Untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antara perusahaan atau antar waktu (satu periode).
2. Untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang digunakan.
3. Untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan rasio keuangan.
4. Untuk mengkaji hubungan empiric antara rasio keuangan dan estimasi atau prediksi variabel tertentu (seperti kebangkrutan atau *financial distress*).

Untuk membuktikan bahwa laporan keuangan bermanfaat maka dilakukan penelitian mengenai manfaat laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitian yang menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu penelitian yang berkaitan dengan manfaat laporan keuangan untuk tujuan memprediksikan kinerja perusahaan. Indikator-indikator dalam kinerja keuangan dibuat untuk melakukan

analisa yang tajam terhadap berbagai aktivitas keuangan yang relevan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji tentang pentingnya pemanfaatan analisis rasio keuangan seperti yang dilakukan oleh Altman (1968) yang merupakan penelitian awal yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Secara umum disimpulkan bahwa rasio rasio keuangan tersebut biasa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan Organisasi Publik seperti PDAM berbeda dengan organisasi private /swasta. Hal ini tidak lepas dari misi yang diemban oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara/Daerah seperti PDAM dalam kedudukannya sebagai organisasi public. Dalam melihat kinerja pemerintah dapat dipergunakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kebijakan itu terutama yang berkaitan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan pemerintah tersebut.

Terkait dengan penilaian kinerja keuangan PDAM, pemerintah telah mengeluarkan pedoman penilaian kinerja keuangan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

2.1.3 Kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Air merupakan kebutuhan dasar makhluk untuk menunjang kelangsungan hidup dan aktivitasnya. Manusia dapat bertahan hidup beberapa minggu tanpa makan, tapi hanya mampu bertahan beberapa hari saja tanpa air. Sumber air di

bumi berasal dari air tanah, mata air, air sungai, danau, dan air laut. Meski 75% permukaan bumi terdiri dari air, namun hanya 1% saja yang bisa dimanfaatkan sisanya terdiri dari air laut dan berada di tempat-tempat yang sulit terjangkau seperti kutub dan amazone, dimana sangat tidak ekonomis jika diangkut dari tempat-tempat tersebut untuk bisa digunakan. Kondisi pulau yang dikelilingi laut kadang menyebabkan air di daerah tersebut payau sehingga kurang layak untuk diminum. Seperti halnya yang terjadi di Pulau Ternate.

Ternate, Provinsi Maluku Utara, adalah kota kepulauan yang terletak di kaki gunung Gamalama dengan luas wilayah kurang lebih 40 km². Dengan luas wilayah seperti itu, Ternate tergolong sebagai pulau kecil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Kodoatie (2012) menyebutkan bahwa dari 17.508 pulau yang ada di Indonesia, 5 pulau memiliki luas > 10.000 km², 26 pulau memiliki luas antara 2.000-10.000 km², dan sisanya sejumlah 17.477 (99,8%) merupakan pulau dengan luas < 2.000 km² (pulau kecil dan sangat kecil). Masalah yang sering melanda daerah pulau-pulau kecil adalah ketidaktersediaan air bersih/tawar untuk kebutuhan rumah tangga.

Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Predikat bumi sebagai "Planet Air" dengan 70% permukaan bumi tertutup air bertolak belakang dengan keadaan Bumi yang menghadapi kelangkaan air.

Berkebalikan dengan kondisi keterbatasan air ini, banyak orang mengeksploitasi air secara berlebih. Padahal, semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis, dimana orang rela bersusah-susah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih.

Seiring waktu, pertumbuhan masyarakat yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri, banyak yang menggunakan lahan dan air menyebabkan kelangkaan air semakin meningkat. Sumber-sumber air tercemar karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan industri, menyebabkan kualitas air yang bisa langsung dicerna dan dikonsumsi oleh penduduk semakin sedikit.

Dibutuhkan suatu badan dan sistem pengelolaan dan penyediaan air baku untuk dikelola menjadi air bersih yang dapat didistribusikan kepada penduduk. Sejarah panjang berdirinya perusahaan pengelolaan air minum, sampai terbentuknya PDAM dan terbitnya UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan air minum.

Keberadaan perusahaan daerah ini dapat dipandang sebagai wujud pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kebutuhan masyarakat akan air. Sedangkan sebagai badan usaha, tentunya dituntut pula agar dikelola berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang sehat agar paling tidak mampu membiayai dirinya sendiri bahkan dapat menjadi sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tujuan Perusahaan Daerah ini menurut Manulang (2006) adalah untuk turut melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Setiap perusahaan daerah harus berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Nick Devas (2001) kebijakan tentang perusahaan daerah diperlukan tujuan yang jelas jika perusahaan daerah ingin berjalan dengan baik. Untuk perusahaan daerah jenis tertentu, menghasilkan uang masuk untuk pemerintah daerah merupakan tujuan yang tepat, tetapi dalam hal kegiatan pelayanan masyarakat, tujuan yang paling tepat adalah pulang pokok. Pendekatan “biaya tetap” dalam sistem bagi laba pada perusahaan air minum jelas paling tidak tepat.

Tugas pokok PDAM mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/Kpts/1984 tanggal 8 Agustus 1984, adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih. Tujuannya adalah memberikan pelayanan air kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis.

Selain itu PDAM merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang bertujuan dapat menghasilkan tambahan penghasilan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Dengan mengacu pada penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diidentifikasi tujuan dari kebijakan tentang PDAM yaitu: untuk memberikan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat

secara adil dan merata berdasarkan persyaratan kualitas air yang telah ditentukan dan menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sangat luar biasa sekali pemikiran dan kebijakan para pendiri Bangsa Indonesia agar terwujudnya tujuan bangsa yang adil dan sejahtera, dimana telah menempatkan air dalam suatu kerangka kebijakan yang mendasar, yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air ke masyarakat/pelanggan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Pada tahun terbit Permen OTDA No.8/2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (*Water and Sanitation for Low Income Community*). Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.

Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM. Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Departemen Pekerjaan Umum telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumah sebesar Rp. 54 trilyun. Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).

2.2 Penelitian Terdahulu

PDAM sebagai salah satu badan usaha milik pemerintah daerah dihadapkan pada dua tuntutan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berorientasi sosial dan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Dalam memenuhi kedua tuntutan tersebut selalu menjadi sorotan penilaian baik dari masyarakat maupun pihak internal pemerintah, sehingga banyak pihak tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut kinerja perusahaan tersebut.

Moeljo (1997) telah melakukan penelitian mengenai kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya periode tahun 1993-1996 dengan tujuan untuk mengetahui kinerja PDAM secara umum dan untuk mengetahui kinerja keuangan PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang pedoman dan Pemantauan Kinerja Keuangan PDAM. Kesimpulan yang diperoleh adalah kinerja keuangan PDAM otamadya Dati II Surabaya selama periode 1993-1996 semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kapasitas produksi, tingkat pelayanan, penjualan air,

pendapatan usaha dan jumlah pelanggan. Tingkat kesehatan PDAM pada tahun 1993-1996 menunjukkan kinerja sehat (S).

Engko (1999) telah melakukan penelitian mengenai kinerja finansial Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sorong periode tahun 1994-1998 dengan menganalisis pengelolaannya, kemungkinan pengembangan, menghitung *common size*, indeks, efektivitas, rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Kesimpulan yang diperoleh adalah *common size* dan neraca indeks menunjukkan jumlah aktiva pada tahun 1994-1998 cukup baik, kinerja keuangan pada tahun 1994-1998 kurang sehat, dan secara operasional belum berhasil.

Rahmawati (2001) telah melakukan penelitian tentang kinerja PDAM “Delta Tirta” dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, studi kasus di Kabupaten Sidoarjo tahun 1990-1999, dengan mengukur kinerja keuangannya, operasional, administrasi, dan menganalisis elastisitas PDRB per kapita riil terhadap laba riil PDAM. Kesimpulan yang diperoleh adalah menunjukkan kinerja PDAM “Delta Tirta” kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun, tingkat keberhasilannya mempunyai nilai “cukup” kecuali tahun 1992 dan tahun 1995 mempunyai nilai “baik”.

Hasil penelitian tersebut tidak berlaku umum dalam pengertian bahwa kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja PDAM kota Ternate. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti, lokasi penelitian, dan standar penilaian dengan menggunakan Keputusan Mendagri No 47 tahun 1999.

Secara umum penilaian kinerja keuangan mencakup pengukuran terhadap keseimbangan struktur permodalan, pendayagunaan asset yang tertanam, profitabilitas efisiensi dalam pengelolaan dana dan penggunaan dana, serta kemampuan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Lebih lanjut dinyatakan bahwa secara rinci kinerja keuangan dijabarkan dalam indikator-indikator yang digunakan antara lain Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif, Rasio Laba terhadap Penjualan, Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar, Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas, Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang, Rasio Biaya Operasi terhadap pendapatan Operasi, Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo, Rasio Aktiva Produktif, Rasio Jangka Waktu Penagihan Piutang, dan Rasio Efektivitas Penagihan.

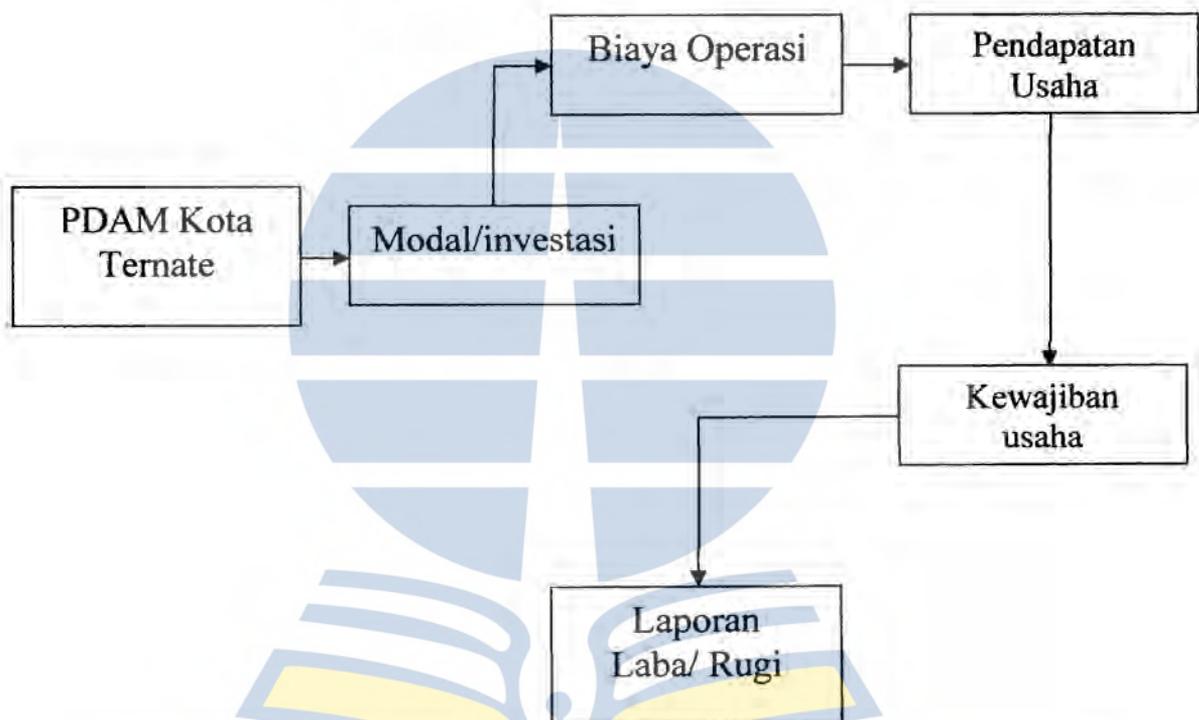
2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Muhamad (2009) Kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Menurut Riduwan (2004), Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian.

Uraian dalam kerangka pikir ini menjelaskan antar variabel. Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang keterkaitan antar variabel penelitian yang akan dikaji, yang akan dibangun oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian berdasarkan hasil tinjauan pustaka.

Berdasarkan teori diatas, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai organisasi bisnis yang berorientasi pada profit atau agen sosial diharapkan selalu memiliki kinerja yang baik. PDAM sebagai badan usaha daerah yang bersumber dari pemerintah pusat keberadaannya cukup penting karena selain memiliki non komersial yaitu bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dasar manusia, perusahaan ini dituntut pula untuk memupuk pendapatan melalui laba yang diperoleh karena fungsinya sebagai *business entity*.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa untuk mengetahui kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hubungan antara variabel modal, biaya, pendapatan, serta kewajiban usaha sangat berkaitan erat dan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan PDAM Kota Ternate untuk kurun waktu 2014 sampai dengan 2015. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu pencarian masalah terhadap hal-hal yang menyebabkan baik atau tidak baiknya kinerja keuangan PDAM kota Ternate serta menganalisis solusi ideal untuk meningkatkan kinerja keuangan PDAM kota Ternate.

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan PDAM kota Ternate untuk kurun waktu 2014-2015. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu menganalisis kinerja keuangan PDAM kota Ternate untuk mengetahui tingkat keberhasilan aspek keuangan serta menganalisis solusi ideal untuk meningkatkan kinerja keuangan PDAM kota Ternate.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Ternate. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan PDAM hingga penulisan laporan hasil

penelitian direncanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan April hingga Juni 2016. Penelitian dilakukan pada periode tahun buku 2014-2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kasus, dan literatur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan PDAM yang sudah diaudit yang bersumber dari buku laporan tahunan PDAM kota Ternate pada tahun 2014-2015.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Data

Teknik pengukuran kinerja keuangan berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999. Dalam pedoman tersebut, digunakan 3 aspek untuk menilai kinerja manajemen yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dalam menilai kinerja aspek keuangan PDAM kota Ternate, digunakan 10 indikator rasio keuangan. Indikator rasio menggunakan skala nilai antara 1 sampai dengan 5. Karena nilai tertinggi dan terendah 1, maka *range* penilaian kinerja keuangan untuk masing-masing indikator dinilai berdasarkan rata-ratanya yang kemudian akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis dan Skor Rasio Keuangan

No	Jenis Rasio	Rumus	Skor Rasio
1.	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	$= \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio >12% diberikan skor 5 • Rasio 9% - 12% diberikan skor 4 • Rasio 6% - 9% diberikan skor 3 • Rasio 3% - 6% diberikan skor 2 • Rasio 0% - 3% diberikan skor 1
2.	Rasio Laba terhadap Penjualan	$= \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio >20% diberikan skor 5 • Rasio 14% -20% diberikan skor 4 • Rasio 6% - 14% diberikan skor 3 • Rasio 0% - 6% diberikan skor 2 • Rasio 0% diberikan skor 1
3.	Rasio Aktiva Lancar terhadap utang Lancar	$= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio 1,75–2,00 diberikan skor 5 • Rasio 1,50–1,75 diberikan skor 4 • Rasio 1,25–1,50 diberikan skor 3 • Rasio 1,00–1,25 diberikan skor 2 • Rasio < 1,00 diberikan skor 1
4.	Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Total Hutang	$= \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio < 0,5 diberikan skor 5 • Rasio 0,5 – 0,7 diberikan skor 4 • Rasio 0,7- 0,8 diberikan skor 3 • Rasio 0,8-1,0 diberikan skor 2 • Rasio > 1,0 diberikan skor 1

No	Jenis Rasio	Rumus	Skor Rasio
5.	Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang	$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 2,0 diberikan skor 5 • Rasio 1,7 – 2,0 diberikan skor 4 • Rasio 1,3 - 1,7 diberikan skor 3 • Rasio 1,0 -1,3 diberikan skor 2 • Rasio < 1,0 diberikan skor 1
6.	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 2,0 diberikan skor 5 • Rasio 1,7 – 2,0 diberikan skor 4 • Rasio 1,3 - 1,7 diberikan skor 3 • Rasio 1,0 -1,3 diberikan skor 2 • Rasio < 1,0 diberikan skor 1
7.	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	$\frac{\text{Laba Operasi sebelum biaya jatuh tempo}}{\text{Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 2,0 diberikan skor 5 • Rasio 1,7 – 2,0 diberikan skor 4 • Rasio 1,3 - 1,7 diberikan skor 3 • Rasio 1,0 -1,3 diberikan skor 2 • Rasio < 1,0 diberikan skor 1

No	Jenis Rasio	Rumus	Skor Rasio
8.	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	$\frac{\text{Aktiva Produktif}}{\text{Penjualan (Pendapatan Operasional)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio < 2,0 diberikan skor 5 • Rasio 2,0 – 4,0 diberikan skor 4 • Rasio 4,0 – 6,0 diberikan skor 3 • Rasio 6,0 – 8,0 diberikan skor 2 • Rasio > 8,0 diberikan skor 1
9.	Jangka Waktu Penagihan Piutang	$\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Jumlah Penjualan perhari}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio < 60 diberikan skor 5 • Rasio 60 - 90 diberikan skor 4 • Rasio 90 - 150 diberikan skor 3 • Rasio 150 - 180 diberikan skor 2 • Rasio > 180 diberikan skor 1
10.	Efektivitas Penagihan	$\frac{\text{Rekening Tertagih}}{\text{Penjualan Air}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio > 90% diberikan skor 5 • Rasio 85%-90% diberikan skor 4 • Rasio 80%-85% diberikan skor 3 • Rasio 75%-80% diberikan skor 2 • Rasio < 75% diberikan skor 1

Dari alat analisis di atas, perhitungan nilai kinerja aspek keuangan berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 dinyatakan sudah mencapai nilai maksimum atau belum adalah sebagai berikut:

$$\text{Penilaian indikator aspek keuangan} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{60} \times 45$$

Keterangan :

60 = Nilai maksimum indikator aspek keuangan

45 = Bobot kinerja aspek keuangan

Untuk menentukan klasifikasi tingkat kinerja keuangan PDAM di Kota Ternate, ditetapkan tolak ukur sebagai berikut :

Tabel 3.2 Klasifikasi Kinerja Keuangan PDAM

Jumlah Nilai / Skor	Tingkat Kesehatan (Klasifikasi)
>75	Baik Sekali
60 – 75	Baik
45 – 60	Cukup
30 – 45	Kurang Baik
≤ 30	Tidak Baik

Sumber : Kepmendagri No 47 tahun 1999

3.4.2 Definisi Operasional

Untuk menyatukan persepsi dan kesamaan pandangan variabel-variabel penelitian, maka selanjutnya akan di kemukakan definisi operasional variabel dan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Rasio laba terhadap aktiva produktif yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan aktiva produktif selama satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).

2. Rasio laba terhadap penjualan yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan penjualan selama satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).
3. Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar selama satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).
4. Rasio hutang jangka panjang terhadap total hutang yaitu perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total hutang dalam satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).
5. Rasio total aktiva terhadap total hutang yaitu perbandingan antara total aktiva dengan total hutang dalam satu periode, dinyatakan dalam rasio (%).
6. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi yaitu perbandingan antara biaya operasi dengan penjualan dalam satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).
7. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo yaitu perbandingan antara laba operasi sebelum biaya penyusutan dengan angsuran pokok dan bunga jatuh tempo dalam satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).
8. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air yaitu perbandingan aktiva produktif dengan pendapatan operasional dalam satu periode, dinyatakan dengan rasio (%).

9. Jangka waktu penagihan piutang yaitu periode pengumpulan piutang selama satu periode yang diperoleh dengan membandingkan piutang usaha dengan jumlah penjualan per hari, dinyatakan dengan hari.
10. Efektivitas penagihan yaitu jumlah penagihan piutang dari penjualan air yang diperoleh dengan membandingkan rekening tertagih dengan penjualan air, dinyatakan dengan rasio (%).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PDAM

4.1.1 Sejarah Singkat PDAM

Pada tahun 1973, Dinas Pekerjaan Umum seksi Maluku Utara membangun *Brau Captering Santosa* yang dikhususkan untuk melayani pelabuhan. Akan tetapi, dua tahun kemudian sistem ini tidak dapat berfungsi lagi. Selanjutnya pada tahun 1978 Proyek Air Bersih Maluku/ Dinas Pekerjaan Umum Dati I Maluku kembali merehabilitasi dan meningkatkan kemali *Brau Captering Santosa* dengan sasaran untuk mengalihkan pendistribusian ke jaringan distribusi pelayanan untuk 200 pelanggan air minum di wilayah kota. Selanjutnya pada tahun 1979, proyek Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Maluku di Ternate membuat 6 unit sumur dangkal, reservoir pipa transmisi atau distribusi dan sambungan ke rumah (SR).

Untuk mengolah sarana air bersih yang telah selesai dibangun, maka dibentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Maluku Utara dengan berdasar surat keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum No. 109/KPTS/CK/XI/1980 tertanggal 26 November 1980. Setelah pengelola BPAM Maluku Utara mencapai titik impas (*break even point*) dan jaringan distribusi yang terpasang siap dikembangkan, maka terhitung tanggal 30 Maret 1987 status Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Dati II Maluku Utara di Ternate berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Dati II Maluku Utara No. 3 tahun 1984 serta berita-berita acara

penyerahan dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur Maluku No. 539/68 tertanggal 9 Februari 1987 dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati kepala daerah tingkat II Maluku Utara di Ternate untuk dikelola.

Tanggal 26 November 1980, SK Menteri Pekerjaan Umum RI No. 109/KPTS/XI/1980 tentang pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) kabupaten Maluku Utara. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2007, kepemilikan PDAM dari Pemda Kabupaten Halmahera Barat resmi diserahkan kepada Pemda Kota Ternate.

4.1.2 Visi dan Misi

PDAM kota Ternate memiliki visi yaitu “PDAM sebagai penyedia air minum terkemuka dengan mengutamakan kepuasan pelanggan” sedangkan dua misi dari PDAM kota Ternate yaitu :

1. Menyediakan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan

4.1.3 Data Umum PDAM

Jumlah karyawan PDAM kota Ternate hingga saat ini ada 177 orang dengan pegawai teknik sebanyak 91 orang dan pegawai administrasi sebanyak 86 orang. Pelanggan PDAM hingga tahun 2015 sebanyak 25.905 sambungan yang terdiri dari sosial umum, sosial khusus, rumah tangga, instansi

pemerintah/TNI/POLRI, Niaga/usaha kecil, niaga/usaha besar, dan khusus. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Data Sambungan Pelanggan PDAM

No.	Pelanggan	Sambungan	persentase
1	Sosial Umum	48 SL	0,2 %
2	Sosial Khusus	422 SL	1,6 %
3	Rumah Tangga	23.922 SL	91,7 %
4	Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI	353 SL	1,4 %
5	Niaga/ Usaha Kecil	587 SL	2,8 %
6	Niaga/ Usaha Besar	567 SL	2,3 %
7	Khusus	6 SL	0,01 %
Jumlah		25.905 SL	100 %

Sumber : Data teknis PDAM 2015

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan dari seluruh pelanggan PDAM yang berjumlah 25.905 sambungan langsung (SL), kelompok dengan sambungan terbanyak adalah rumah tangga yaitu sebanyak 23.922 SL dengan persentase sebesar 91,7%. Di tempat kedua sambungan terbanyak adalah Niaga/Usaha Kecil yaitu 587 SL dengan persentase 2,8%. Selanjutnya ada Niaga/Usaha Besar yang mempunyai sebanyak 567 SL dengan persentase 2,3%. Ditempat berikutnya adalah kelompok sosial khusus yaitu sebanyak 422 SL dengan persentase sebesar 1,6%. Di tempat ke lima adalah kelompok instansi pemerintah/ TNI/ POLRI sebanyak 353 SL dan persentase sebesar 1,4%. Selanjutnya ditempat keenam adalah kelompok sosial umum dengan jumlah sambungan 48 SL dengan persentase sebesar 0,2%. Kemudian yang terakhir adalah kelompok khusus dengan jumlah sambungan hanya 6 SL dengan persentase sebanyak 0,01%.

4.1.4 Data Teknis PDAM

Pada saat pengambil alihan dari pemerintah kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2007, kondisi keuangan PDAM tidak sehat yang diakibatkan dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sehingga untuk merealisasi bisnis plan tahun 2008-2012 (lampiran 5). Pemerintah kota Ternate menyediakan dana penyertaan modal tahun 2007 sebesar Rp. 4 Milyar. Tujuan penyertaan modal tahun 2007 adalah :

1. Peningkatan kapaistas produksi 60 l/d pada 4 unit instalasi produksi PDAM (Akegaale, Kalumpang, Ubo-ubo, dan Kalumata)
2. Peningkatan kapasitas instalasi pompa booster Skeep sebesar 22 l/d
3. Pembangunan rumah genset 60 m² di Kalumpang
4. Pengadaan genset 3 unit total 500 KVA (100+150+250 KVA)
5. Penambahan daya listrik PLN 5 unit instalasi sebesar 272 KVA (Akegaale, Kalumpang, Ubo-ubo, dan Kalumata)
6. Pemasangan jaringan pipa transmisi DN 200 mm sepanjang 750 m² dan pipa distribusi DN 90-63 mm sepanjang 1.464 m²

Sedangkan pada tahun 2008 dana penyertaan modal pemerintah daerah kota Ternate sebesar Rp. 3 Milyar diperuntukan sebagai berikut:

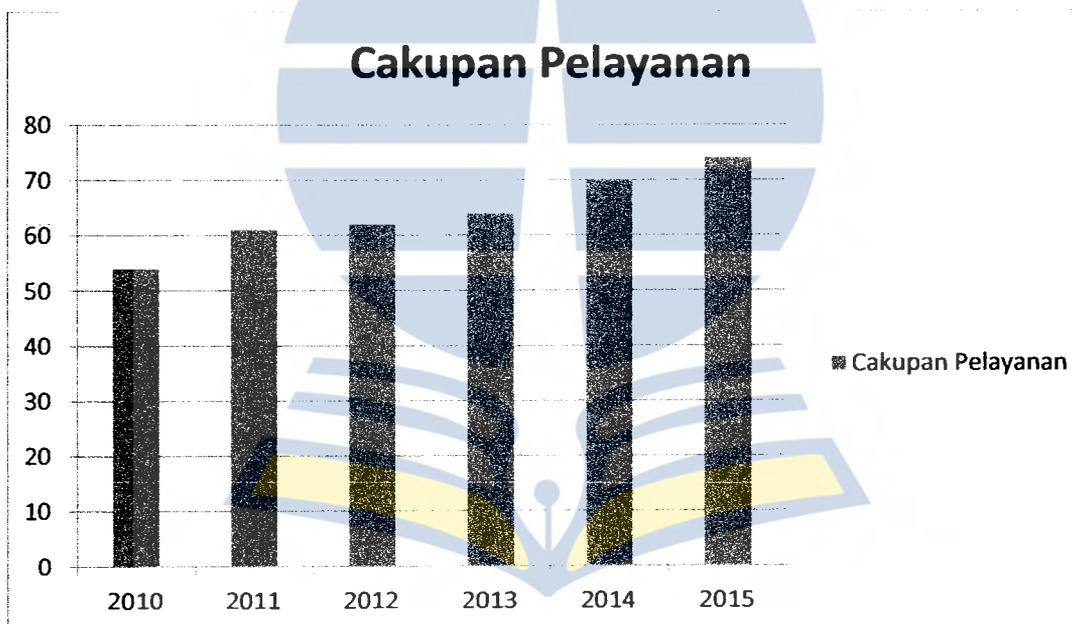
1. pemasangan HUTR 7 trafo PLN 665 KVA – 5 unit (Akegaale, Kalumpang, Ubo-ubo, dan Kalumata)
2. Penambahan daya listrik PLN pada 3 unit instalasi sebesar 122 KVA(Akegaale, Facey, Skeep)
3. BP/ UJL/ EMIN untuk 7 unit instalasi 2007-2008

4. Penambahan 1 unit sumur produksi produksi : 10 l/d (Kalumata)
5. Pemasangan jaringan transmisi dan distribusi DN 160-110 mm sepanjang 2.400 m
6. Pembuatan jembatan pipa sepanjang 213 m
7. Penelitian sumber air geolistrik (Ternate- Hiri)

Data teknis PDAM hingga Desember 2015 menggambarkan mengenai data kapasitas sumber produksi, data reservoir PDAM kota Ternate, data jaringan pipa, transmisi dan distribusi, tingkat konsumsi air, dan daftar tarif air yang berlaku disajikan pada lampiran 1, 2, 3, dan lampiran 4.

Hingga akhir tahun 2015, cakupan pelayanan PDAM Kota Ternate telah mencapai 74,65%. Rincian cakupan pelayanan dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 4.1 . Cakupan Pelayanan PDAM Kota Ternate



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan PDAM dari tahun 2010 hingga tahun 2015 telah mengalami peningkatan yang cukup

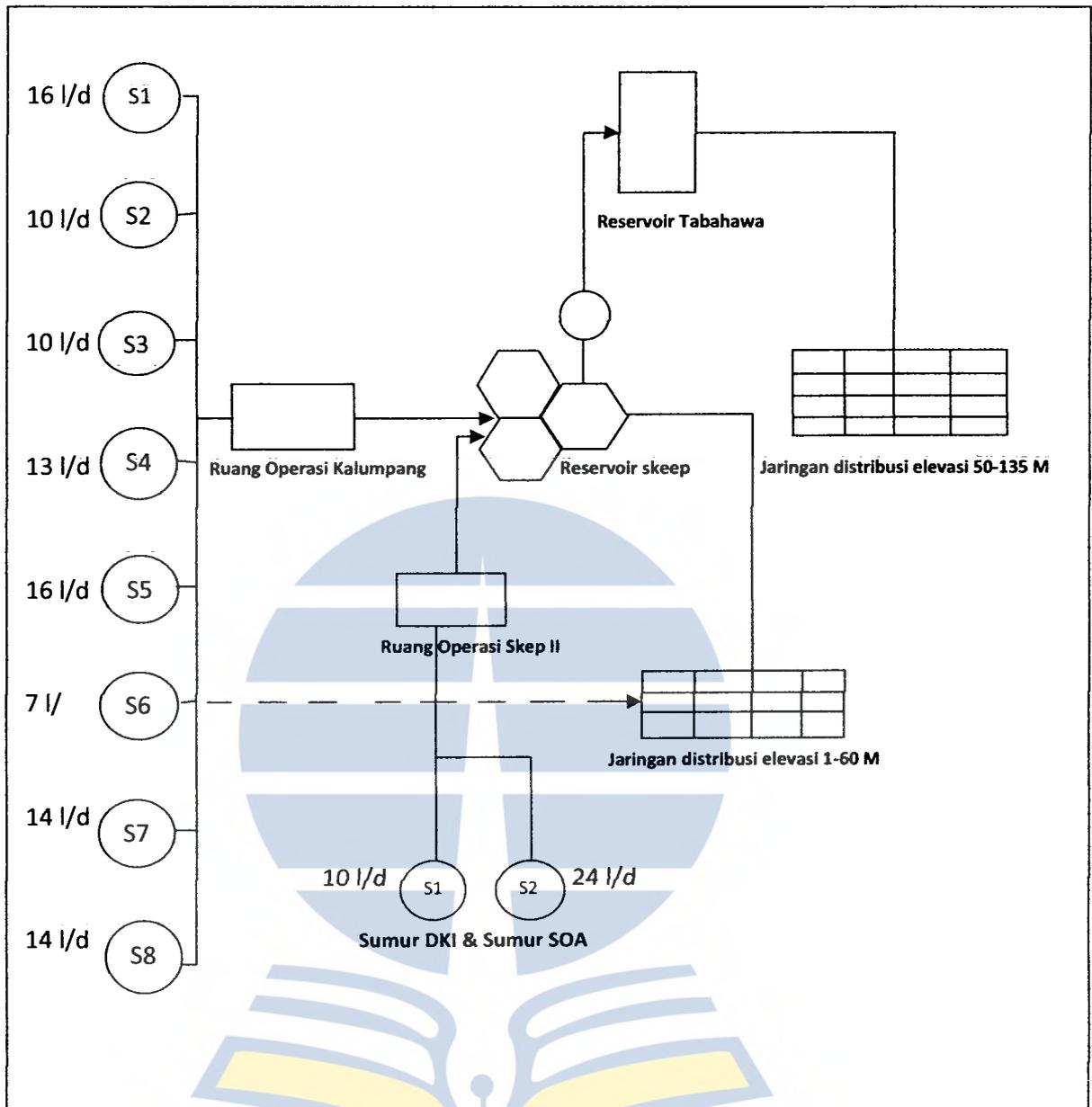
baik. Pada tahun 2010, cakupan pelayanan PDAM berada di angka 54,06%. Pada tahun selanjutnya yaitu 2011 cakupan pelayanan PDAM kota Ternate meningkat menjadi 61,06%. Di tahun 2012, kenaikan cakupan pelayanan PDAM Kota Ternate hanya 1% yaitu 62,76% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2013, kenaikan sebesar 2% yaitu 64,34% saja. Untuk tahun 2014, terjadi kenaikan cakupan Pelayanan PDAM Kota Ternate yang cukup signifikan yaitu sebesar 6% sehingga jumlah cakupan pelayanan menjadi 70,93%. Di tahun terakhir 2015, cakupan pelayanan PDAM Kota Ternate naik sekitar 4% yaitu sebesar 74,65%.

Hingga saat ini, instalasi sumber Air PDAM telah mempunyai 8 lokasi yaitu Kelurahan Akegaale, Kelurahan Kalumpang, Kelurahan Skeep/Soa, Kelurahan Ubo-Ubo, Kelurahan Kalumata, Kelurahan Togafo, Kelurahan Kulaba/Bula, dan Kelurahan Fitu/Kastela.

1. Pelayanan melalui instalasi produksi di Kelurahan Kalumpang memiliki kapasitas produksi sebanyak 170 l/detik dan area pelayanannya meliputi :
 - a. Daerah Ternate Selatan sampai Kelurahan Tanah Tinggi
 - b. Daerah Ternate Tengah sekitaran Kelurahan Kampung Makassar
 - c. Daerah ketinggian sekitaran Kelurahan Moya

Pelayanan pada daerah rendah menggunakan sistem grafitasi sedangkan pelayanan untuk daerah ketinggian menggunakan pompa booster. Berikut adalah gambar skema sistem PDAM Kota Ternate untuk wilayah Kelurahan Kalumpang dan Kelurahan Skeep :

Gambar 4.2. Skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan Kalumpang dan Kelurahan Skeep

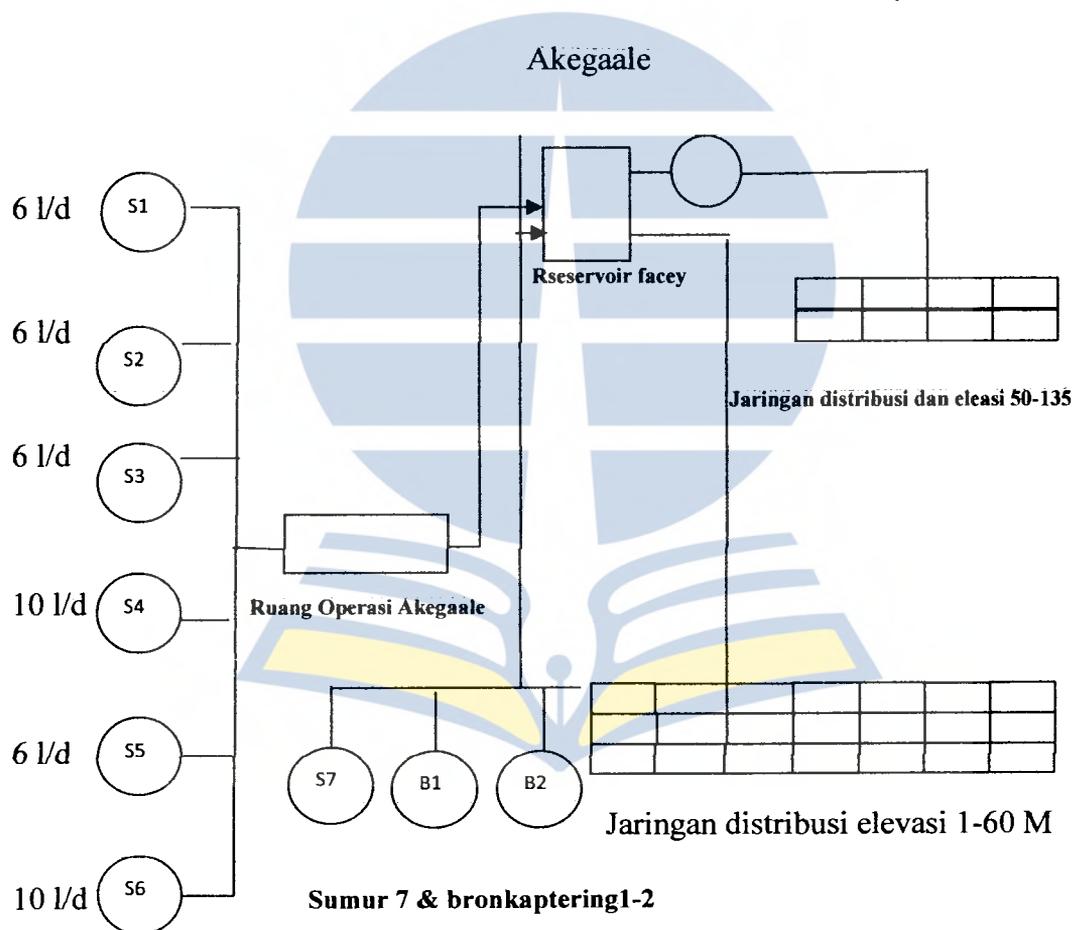


Sumber : Data Teknis PDAM Ternate 2015

2. Pelayanan melalui instalasi produksi di Kelurahan Akegaale memiliki kapasitas produksi sebanyak 105 l/det. Areal pelayanan meliputi :
- Daerah Selatan sekitaran Kelurahan Kampung Makassar
 - Daerah Tengah sekitaran Kelurahan Saangaji
 - Daerah Utara sekitaran Kelurahan Tarau

Pelayanan pada daerah rendah menggunakan sistem grafitasi sedangkan pelayanan untuk daerah ketinggian menggunakan pompa booster. Berikut adalah gambar skema sistem PDAM Kota Ternate untuk wilayah Kelurahan Akegaale :

Gambar 4.3. Skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan

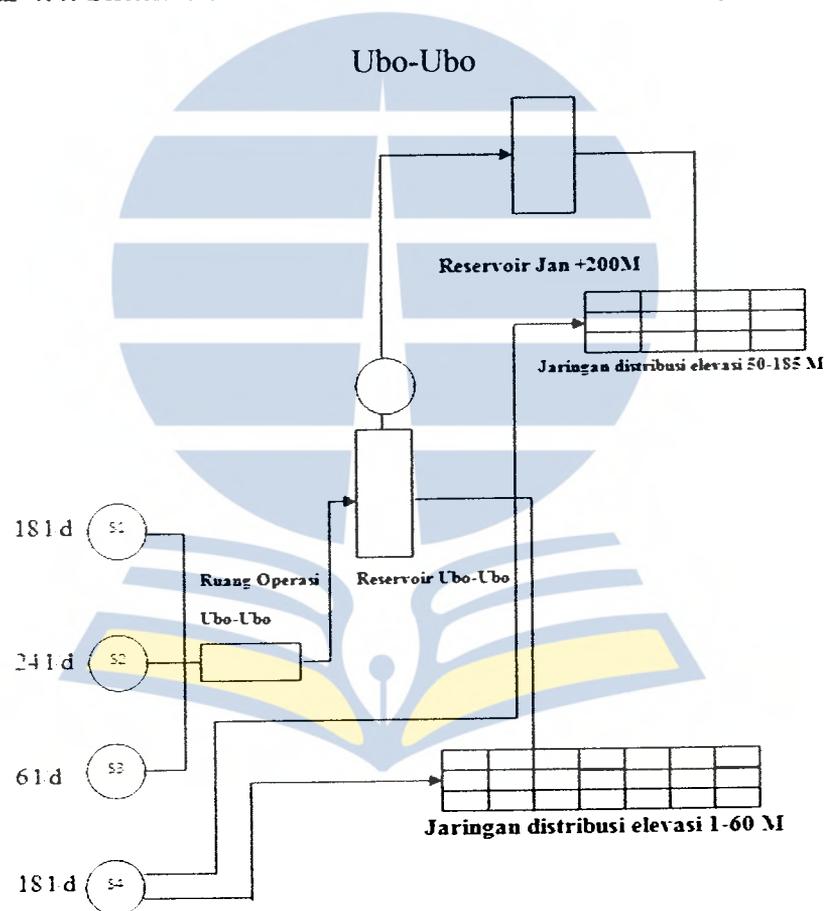


Sumber : Data Teknis PDAM Ternate 2015

3. Pelayanan melalui instalasi produksi di Kelurahan Ubo-Ubo memiliki kapasitas produksi sebanyak 70 l/det. Area pelayanan meliputi :
- Daerah Selatan sekitaran Kelurahan Kayu Merah
 - Daerah Tengah sekitaran Kelurahan Mangga Dua
 - Daerah Utara sekitaran Jati/Jan

Pelayanan pada daerah rendah menggunakan sistem grafitasi sedangkan pelayanan untuk daerah ketinggian menggunakan pompa booster. Berikut adalah gambar skema sistem PDAM Kota Ternate untuk wilayah Kelurahan Ubo-Ubo:

Gambar 4.4. Skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan

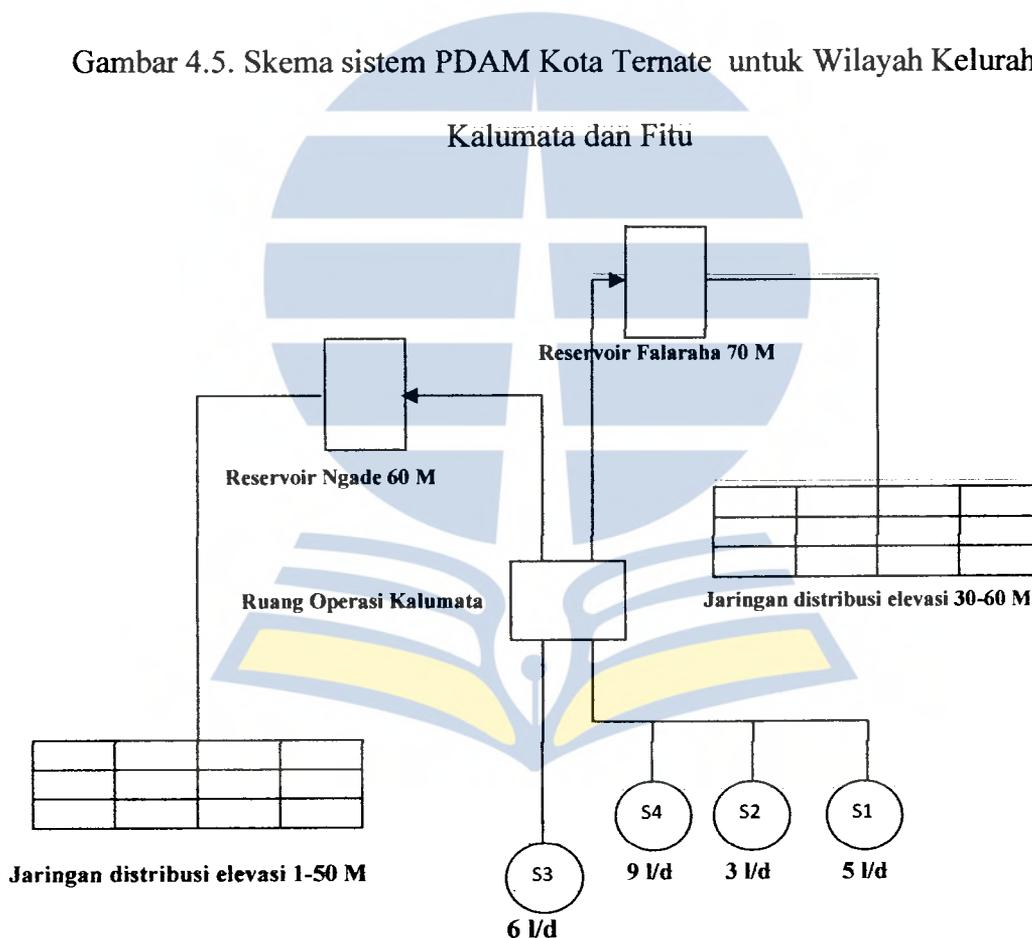


Sumber : Data Teknis PDAM Ternate 2015

4. Pelayanan melalui instalasi produksi di Kelurahan Kalumata dan Fitu memiliki kapasitas produksi sebesar 43 l/det untuk Kelurahan Kalumata, dan 5 l/det untuk kapasitas produksi Kelurahan Fitu. Area pelayanan meliputi:
- Daerah Selatan sekitaran Kelurahan Jambula
 - Daerah Tengah sekitar Kelurahan Ngade
 - Daerah Utara sekitaran Kelurahan Kalumata

Pelayanan pada daerah rendah menggunakan sistem grafitasi sedangkan pelayanan untuk daerah ketinggian menggunakan pompa langsung. Berikut adalah gambar skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan Kalumata dan Fitu:

Gambar 4.5. Skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan

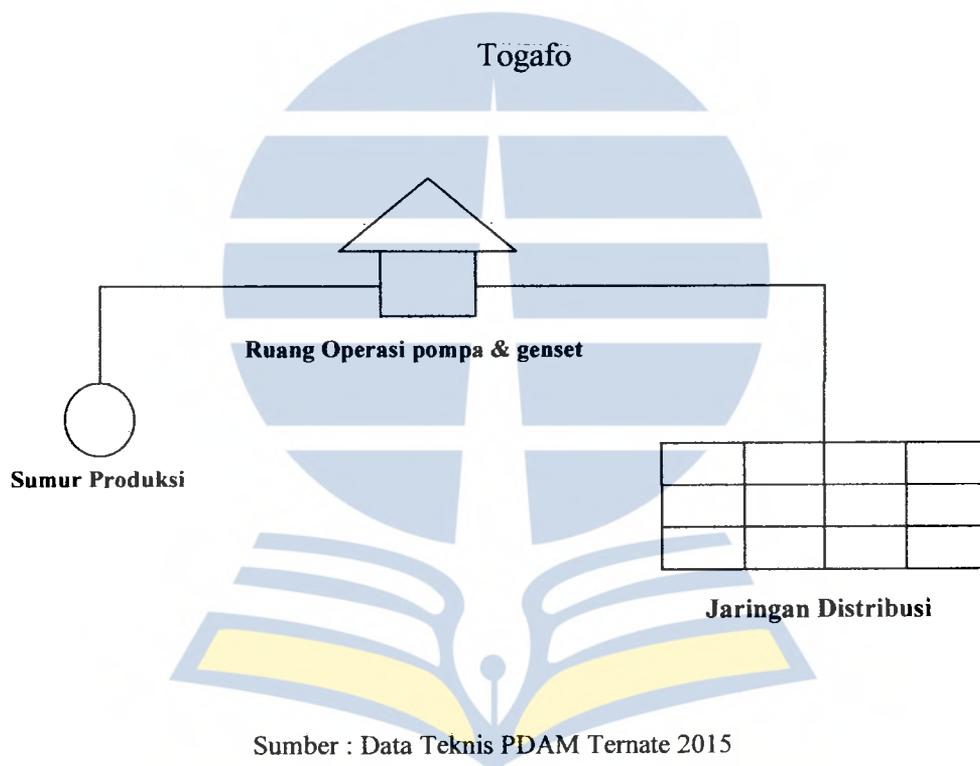


Sumber : Data Teknis PDAM Ternate 2015

5. Pelayanan melalui instalasi produksi di Kelurahan Togafu mempunyai kapasitas produksi sebesar 20 l/det. Areal pelayanan meliputi:
- Daerah Selatan sekitaran Kelurahan Togafu
 - Daerah Tengah sekitaran Kelurahan Loto
 - Daerah Utara sekitaran Kelurahan Tomadehe

Pelayanan pada daerah rendah menggunakan system grafitasi sedangkan pelayanan untuk daerah ketinggian menggunakan pompa langsung. Berikut adalah gambar skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan Togafu:

Gambar 4.6. Skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan

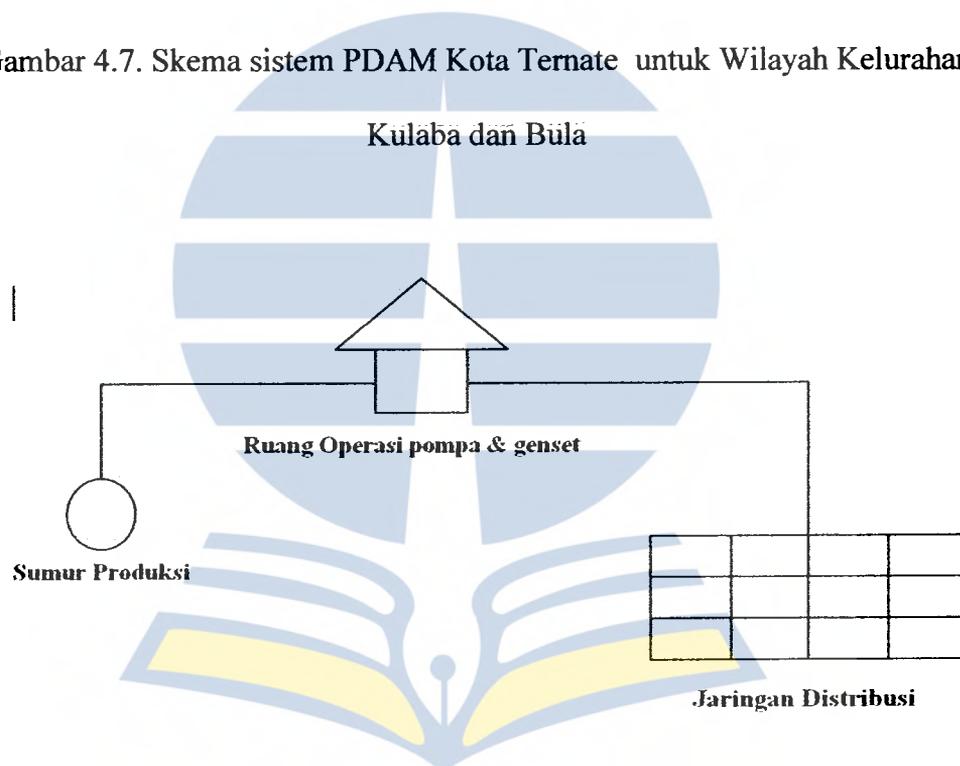


6. Pelayanan melalui instalasi produksi di Kelurahan Kulaba dan Kelurahan Bula mempunyai kapasitas produksi masing-masing sebesar 5 l/det. Areal pelayanan meliputi:

- a. Daerah Selatan sekitaran Kelurahan Kulaba
- b. Daerah Tengah sekitaran Kelurahan Bula
- c. Daerah Utara sekitaran Kelurahan Sulamada

Pelayanan pada daerah rendah menggunakan system grafitasi sedangkan pelayanan untuk daerah ketinggian menggunakan pompa langsung. Berikut adalah gambar skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan Kulaba dan Kelurahan Bula :

Gambar 4.7. Skema sistem PDAM Kota Ternate untuk Wilayah Kelurahan



Sumber : Data Teknis PDAM Ternate 2015

4.2 Kondisi Keuangan PDAM Kota Ternate

Berdasarkan data yang diperoleh, gambaran keadaan keuangan PDAM Kota Ternate dari tahun 2014-2015 di lampirkan pada lampiran 6, 7, 8. Data nilai akun yang dipakai sebagai elemen indikator kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan PDAM (Laporan Laba Rugi, Laporan Neraca, dan Laporan Arus Kas) disajikan pada Lampiran 9.

4.3 Pembahasan Analisa Rasio Keuangan

Analisa rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan PDAM dilakukan dengan menggunakan Kepmendagri No. 47 tahun 1999. Berdasarkan hasil analisa rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan PDAM (Lampiran 10), maka dapat ditabulasikan hasil analisis data pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Nilai dan Bobot Kinerja PDAM Kota Ternate

No.	Indikator	2014		2015	
		Rasio	Nilai	Rasio	Nilai
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	0.04	1	-0.03	0
2	Rasio Laba terhadap Penjualan	0.06	2	-0.06	0
3	Rasio Aktiva Lancar terhadap utang Lancar	0.81	1	0.80	1
4	Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Total Hutang	0.00	5	0.00	5
5	Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang	3.36	5	4.36	5
6	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	0.67	3	0.67	3

No.	Indikator	2014		2015	
		Rasio	Nilai	Rasio	Nilai
7	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	0.26	1	0.28	1
8	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	1.26	5	1.69	5
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang	71.33	4	75.44	4
10	Efektivitas Penagihan	0.21	1	0.22	1
Jumlah			28		25

Dari Tabel 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa jumlah nilai yang diperoleh pada tahun 2014 adalah 28 poin sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 25 poin. Untuk menghitung nilai kinerja aspek keuangan masing-masing tahun buku, sesuai dengan standar tingkat keberhasilan PDAM menurut Kepmendagri No. 47 tahun 1999 pasal 3 ayat (1) di klasifikasikan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai kinerja aspek keuangan}}{\text{bobot}} \times 100$$

Sehingga diperoleh hasil kinerja keuangan PDAM kota Ternate tahun 2014-2015 pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Penilaian Tingkat Keberhasilan PDAM Kota Ternate Periode 2014-2015

Tahun	Nilai Maksimal	Bobot	Nilai Kinerja Aspek Keuangan	$\frac{\text{Nilai Kinerja}}{\text{Bobot}} \times 100$	Kategori
2014	60	45	21	46,6	Cukup
2015			18,75	41,6	Kurang
Rata-rata			19,8	44,1	Kurang

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa PDAM kota Ternate di tahun 2014 mempunyai nilai kinerja aspek keuangan sebesar 46,6 dengan kategori “Cukup”, sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan nilai kinerja menjadi 41,6 dengan kategori “Kurang”.

Untuk dapat lebih mengidentifikasi kinerja keuangan PDAM kota Ternate secara rinci, dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah seluruh aktiva yang tersedia dalam perusahaan.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

Tahun	Laba sebelum Pajak (%)	Aktiva Produktif (%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	240.597.197.27	48.169.019.507.24	0.04	1
2015	(2.742.238.006.46)	69.689.967.240.58	-0.03	0

Rasio laba terhadap aktiva produktif yang menggambarkan kemampuan aktiva produktif untuk menghasilkan laba sebelum periode pengamatan. Nilai rasio ini semakin tinggi semakin baik, sebab hal itu menunjukkan bahwa aktiva produktif yang dimiliki perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang baik. Sebaliknya, jika nilai rasio rendah akan menunjukkan kemampuan rasio produktifitas perusahaan menghasilkan laba rendah. Hasil rasio aktiva produktif pada tahun 2014 mendapatkan nilai 1 dengan rasio 0.04%. Namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan rasio -0.03%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas aktiva produktif PDAM

kota Ternate sangat rendah. Dari data tahun masa pengamatan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 semakin rendah. Hal ini terjadi sebab laba yang dihasilkan PDAM kota Ternate semakin turun, bahkan pada tahun 2015 terjadi kerugian yang cukup besar yakni sebesar Rp. 2.742.238.066.46. Pada sisi yang lain aktiva produktif perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sebesar Rp. 48.169.019.507.24 menjadi Rp. 69.689.967.240.58 di tahun 2015. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh penyalahgunaan aset yang belum optimal dan ketidakseimbangan dalam struktur pembiayaan aset sehingga mengakibatkan tingginya beban bunga serta pengelolaan kegiatan operasional yang tidak efisien. Penurunan rasio laba sebelum pajak terhadap aktiva produktif disebabkan karena meningkatnya pengeluaran operasional perusahaan, terutama karena adanya kenaikan biaya operasi dan biaya non operasi seperti sering terjadinya kebocoran pipa di Wilayah Ternate Utara yang mengakibatkan banyak air terbuang percuma sehingga diperlukan penggantian pipa baru.

Untuk meningkatkan rasio ini, diperlukan evaluasi pada kegiatan operasional terutama pada kegiatan yang membutuhkan biaya besar seperti penggantian pipa bocor yang sering terjadi sehingga menyebabkan banyak kehilangan air secara percuma. Penggantian pipa bocor dan tingkat kehilangan air yang cukup tinggi menjadi masalah serius karena berdampak pada pengeluaran operasional perusahaan. Oleh sebab itu, perawatan dan pengecekan secara berkala sangat penting dilakukan untuk mencegah kebocoran pipa terjadi. Dengan adanya pengecekan dan perawatan pipa air

secara berkala diharapkan mampu mengurangi jumlah biaya operasional, dan meningkatkan laba PDAM.

2. Rasio Laba terhadap Penjualan

Rasio ini untuk mengukur laba sebelum pajak (pendapatan operasi ditambah non operasi dikurangi biaya operasi dan biaya non operasi) dibandingkan dengan volume operasi.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Rasio Laba terhadap Penjualan

Tahun	Laba sebelum Pajak (%)	Penjualan (%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	240.597.197.27	38.098.385.958.00	0.06	2
2015	(2.742.238.006.46)	41.193.016.275.00	-0.06	0

Rasio laba terhadap penjualan digunakan untuk mengukur tingkat laba sebelum pajak dibanding dengan volume penjualan. Nilai rasio ini semakin tinggi akan semakin baik, karena menunjukkan bahwa jumlah laba yang diterima oleh perusahaan juga semakin besar. Sebaliknya, jika nilai rasio ini rendah maka akan menunjukkan penjualan air dari perusahaan menghasilkan laba rendah. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa laba yang dihasilkan semakin menurun di tahun 2015. Pada tahun 2015 terjadi kerugian sebesar Rp. 2.742.238.066.46. Namun dari sisi penjualan air terdapat peningkatan ada sisi yang lain aktiva produktif perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 38.098.385.958.00 menjadi Rp. 41.193.016.275.00 pada tahun 2015. Rasio ini selama kurun waktu 2014 mendapatkan hasil 0.06% dan pada

tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar -0.06%. Artinya, hasil penjualan pada tahun 2014 dan 2015 tidak dapat menutupi biaya-biaya baik biaya langsung usaha serta biaya administrasi dan umum yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan air. Lebih kecilnya pendapatan air diakibatkan oleh masih tingginya tingkat kebocoran air yang terjadi di kota Ternate.

Untuk meningkatkan rasio ini, diperlukan pengawasan, perawatan dan pengecekan secara berkala terhadap pipa air untuk mencegah kebocoran yang dapat mengakibatkan air terbuang percuma. Jika tingkat kebocoran air berkurang maka otomatis pendapatan PDAM dari segi penjualan air dapat meningkat.

3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar

Tahun	Aktiva Lancar (%)	Hutang Lancar (%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	11.862.441.112.45	12.837.165.037.38	0.81	1
2015	14.606.914.217.05	15.854.686.948.05	0.80	1

Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar yaitu menghitung berapa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar dengan aktiva lancar

yang tersedia. Pada tahun 2014 jumlah aktiva lancar sebesar Rp. 11.862.441.112.45 dan jumlah hutang lancar Rp. 12.837.165.037.38. rasio ini mendapatkan hasil sebesar 0.81% dengan nilai 1. Tahun 2015 jumlah aktiva lancar naik menjadi Rp. 14.606.914.217.05 dan hutang lancar sebesar Rp. 15.854.686.948.05. Kenaikan jumlah aktiva lancar tidak berdampak dengan bertambahnya hasil nilai indikator bahkan cenderung turun menjadi 0.80%. hal ini disebabkan hutang lancar juga ikut meningkat pada tahun 2015. Rasio ini diinterpretasikan bahwa setiap Rp.1 hutang dijamin oleh 0.81 aktiva lancar. Kondisi ini menunjukkan likuiditas PDAM kota Ternate yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena jumlah hutang yang lebih besar daripada jumlah aktiva lancar. Pada prinsipnya, rasio ini minimal harus bernilai 1, artinya bahwa antara nilai aktiva lancar dengan hutang lancar sebanding. Hal ini menunjukkan semua hutang lancar dapat dibayarkan sewaktu-waktu oleh perusahaan dengan adanya aktiva lancar yang cukup. Jika nilai rasio ini kurang dari 1 maka artinya akan ada sebagian hutang yang tidak dapat segera dibayarkan oleh perusahaan karena tidak mempunyai aktiva lancar yang cukup.

Untuk meningkatkan rasio ini, diperlukan juga peningkatan jumlah aktiva lancar PDAM seperti kas, piutang, dan persediaan air. Jika perusahaan mampu meningkatkan aktiva lancarnya maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

4. Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas

Rasio hutang jangka panjang terhadap modal adalah rasio yang sangat penting bagi para kreditur atau kalangan perbankan dalam melaksanakan penelitian pembiayaan jangka panjang untuk memantau saldo yang diperlukan sehingga perusahaan dapat memperkirakan masa-masa sulit yang berakibat kerugian awal. Rasio tersebut memperlihatkan besar modal yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas

Tahun	Hutang Jangka Panjang (%)	Ekuitas (%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	0	35.611.927.434.21	0.00%	5
2015	0	54.157.762.255.96	0.00%	5

Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas yaitu menghitung perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Berdasarkan tabel di atas, nilai ekuitas meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 35.611.927.434.21 menjadi Rp. 54.157.762.255.96 pada tahun 2015. Hasil perhitungan rasio ini pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 0% dan memperoleh poin maksimal dengan nilai 5. Hal ini disebabkan karena PDAM Kota Ternate tidak mempunyai hutang jangka panjang sehingga ekuitas/modal tidak perlu digunakan untuk membayar hutang jangka panjang PDAM Kota Ternate.

5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh kreditur.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang

Tahun	Total Aktiva (%)	Total Hutang(%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	50.674.448.242.26	70.237.351.181.01	3.36	5
2015	15.062.520.808.05	16.079.588.925.05	4.36	5

Rasio total aktiva terhadap total hutang yang menunjukkan pengukuran jumlah hutang yang dibiayai oleh modal sendiri. Rasio ini memperoleh nilai indikator 5 jika hasil yang diperoleh $> 2,0$. Menurut hasil perhitungan dari tabel diatas, Selama kurun waktu 2014 memperoleh hasil sebesar 3.36% dimana total aktiva berjumlah Rp. 50.674.448.242.26 dan total hutang berjumlah Rp. 70.237.351.181.01, dan pada tahun 2015 naik menjadi 4.36% walaupun jumlah total aktiva menurun sebesar Rp. 15.062.520.808.05 namun jumlah total hutang juga menurun menjadi sebesar Rp. 16.079.588.925.05 sehingga PDAM kota Ternate pada rasio total aktiva terhadap total hutang memperoleh nilai indikator yang sangat baik yaitu 5. Hal ini disebabkan PDAM kota Ternate yang tidak memiliki hutang jangka panjang sehingga tidak diperlukan biaya yang lebih besar untuk membayar hutang.. hasil di atas menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki PDAM kota Ternate sangat baik sehingga mampu menjamin terbayarnya hutang perusahaan.

6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi

Rasio ini untuk mengukur biaya operasi per rupiah. Apabila peningkatan pengeluaran lebih besar daripada peningkatan pendapatan, hal ini dapat menjadi indikator penurunan produktivitas.

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi

Tahun	Biaya Operasi (%)	Pendapatan Operasi (%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	25.852.864.191.45	38.098.385.958.00	0.67	3
2015	27.603.302.024.02	41.193.016.275.00	0.67	3

Rasio ini semakin tinggi nilai indikatornya akan semakin baik karena itu berarti pendapatan operasi yang diterima perusahaan juga tinggi dan bisa menutupi biaya operasional perusahaan dengan sangat baik. Sebaliknya, jika nilai indikator rasio ini rendah, maka artinya pendapatan operasi perusahaan tidak/kurang mampu menutupi biaya operasi perusahaan. Pada PDAM kota Ternate, Rasio biaya operasi terhadap penjualan tahun 2014 menunjukkan bahwa biaya operasi sebesar Rp 25.852.864.191.45 dan pendapatan operasi sebesar Rp. 38.098.385.958.00 dan pada tahun 2015 biaya operasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.603.302.024.02 begitu juga dengan pendapatan operasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp.41.193.016.275.00. Berdasarkan tabel di atas, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi pada tahun 2014 dan 2015 memperoleh hasil yang sama yaitu sebesar 0.67%. Artinya, pada tahun 2014 dan 2015 perusahaan harus meningkatkan pendapatannya sebanyak 0.67 kali untuk menghasilkan pulang pokok bagi

perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya operasi dan pendapatan operasi dari tahun 2014 ke tahun 2015 memiliki selisih yang tidak jauh berbeda yaitu pada tahun 2014 jumlah selisih sebesar Rp. 1.224.552.176.655.00 sedangkan pada tahun 2015 jumlah selisih sebesar Rp. 1.358.971.425.098.00. Terlebih lagi pada saat ini PDAM Kota Ternate sedang mengalami krisis air bersih yang disebabkan intrusi air laut sehingga terdapat beberapa wilayah yang digratiskan biaya rekening airnya oleh PDAM kota Ternate sehingga pendapatan operasi dari penjualan air tidak maksimal diperoleh.

Untuk meningkatkan rasio ini, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah krisis air bersih yang terjadi. Krisis air bersih terjadi akibat mengeringnya beberapa sumber mata air di Ternate. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasinya adalah dengan membuat sumur resapan yang digunakan untuk menampung cadangan air hujan sehingga akan menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah dan menjaga keseimbangan hidrologi air tanah sehingga dapat mencegah intrusi air laut terjadi.

7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo

Rasio ini memperlihatkan berapa kali lebih besar penghasilan operasional dapat menutup pembayaran bunga angsuran dan pokok pinjaman.

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan
terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo

Tahun	Lab a Operasi sebelum Biaya Penyusutan (%)	Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo (%)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	3.968.753.320.89	15.062.520.808.05	0.26	1
2015	4.526.819.097.04	16.079.588.925.05	0.28	1

Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban angsuran pokok dan bunga jatuh tempo dengan laba operasi yang diperoleh. Semakin besar nilai yang diperoleh dari rasio ini akan semakin baik bagi perusahaan karena itu berarti perusahaan mempunyai laba operasional tinggi sehingga otomatis mampu digunakan untuk membayar biaya angsuran dan bunga jatuh tempo yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, jika nilai yang diperoleh dari rasio ini rendah maka tidak baik untuk perusahaan karena itu berarti laba operasional perusahaan tidak mampu menutupi beban angsuran dan bunga jatuh tempo. Dari perhitungan rasio ini, PDAM kota Ternate memperoleh hasil 0.26% pada tahun 2014 dengan jumlah laba operasional sebelum biaya penyusutan sebesar Rp. 3.968.753.320.89 dan biaya angsuran dan jatuh tempo sebesar Rp. 15.062.520.808.05. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 0.28% dimana pada jumlah laba operasional sebelum penyusutan sebesar Rp. 4.526.819.097.04 dan jumlah biaya angsuran dan bunga jatuh tempo sebesar Rp. 16.079.588.925.05. Nilai indikator yang diperoleh adalah 1.

Hal ini disebabkan karena angsuran pokok dan bunga jatuh tempo yang jumlahnya jauh lebih besar dari laba operasi sebelum biaya penyusutan. Hal ini masih disebabkan oleh laba operasional pendapatan penjualan air yang belum maksimal diperoleh PDAM.

Untuk meningkatkan rasio ini, PDAM harus dapat meningkatkan jumlah pendapatan penjualan air. Peningkatan jumlah penjualan air dapat diperoleh jika masalah kebocoran air dan ketersediaan cadangan air juga sudah dapat diatasi.

8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dalam mencapai volume penjualan yang optimal.

Tabel 4.11

Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air

Tahun	Aktiva Produktif (Rp)	Penjualan Air (Rp)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	48.169.019.507.24	34.086.142.858.00	1.26	5
2015	69.689.967.240.58	37.339.855.750.00	1.69	5

Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air digunakan untuk mengukur berapa kali penjualan air dalam menghasilkan aktiva produktif perusahaan. Semakin kecil hasil rasio ini maka semakin baik untuk perusahaan karena itu artinya perusahaan dapat menggunakan aktiva produktif secara efisien dalam mencapai volume penjualan air. Sebaliknya, semakin besar hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa perusahaan tidak/kurang efektif dalam

mengelola aktiva produktif dalam mencapai volume penjualan air. Hasil rasio aktiva produktif terhadap penjualan air PDAM kota Ternate pada tahun 2014 sebesar 1,26% dengan jumlah aktiva produktif sebesar Rp. 48.169.019.507.24 dan penjualan air sebesar Rp. 34.086.142.858.00 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1.69% dengan meningkatnya jumlah aktiva prduktif sebesar Rp. 69.689.967.240.58 dan volume penjualan air yang juga meningkat sebesar Rp. 37.339.855.750.00. Hal ini berarti pada tahun 2014 perusahaan memiliki aktiva produktif sebanyak 1,26% kali lebih besar dari penjualan air. Indikator kinerja PDAM kota Ternate pada rasio ini bernilai 5 yang artinya tingkat efisiensi penggunaan aktiva PDAM kota Ternate dalam mencapai volume penjualan yang optimal sangat baik.

9. Rasio Jangka Waktu Penagihan Piutang

Rasio ini menggambarkan pengelolaan dalam penagihan piutang. Jangka waktu penagihan piutang merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang sehingga dapat dikonversikan menjadi uang tunai.

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Rasio Jangka Waktu Penagihan Piutang

Tahun	Piutang Usaha (Rp)	Jumlah Penjualan per Hari (Rp)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	7.446.106.544.69	104.379.139.61	71.33	4
2015	8.514.342.621.30	112.657.578.84	75.44	4

Rasio jangka waktu penagihan piutang yang menunjukkan kemampuan untuk menagih piutang perusahaan. Sama seperti rasio sebelumnya, semakin

kecil nilai rasio ini maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena hal itu mengartikan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang usaha perusahaan sangat baik, efektif, dan efisien. Sebaliknya jika nilai rasio besar maka hal itu mengindikasikan ketidak mampuan perusahaan dalam mengelola piutang perusahaan dengan tidak/kurang baik, efektif, dan efisien. Rasio Jangka waktu penagihan piutang pada PDAM kota Ternate di tahun 2014 sebesar 71.33 hari dengan jumlah piutang usaha sebesar Rp. 7.446.106.544.69 dan jumlah penjualan perhari sebesar Rp. 104.379.139.61 Pada tahun 2015, PDAM kota Ternate mengalami penurunan hasil rasio sebesar 75.44 hari dan terjadi peningkatan pada jumlah piutang usaha sebesar Rp. 8.514.342.621.30 dan jumlah penjualan air perhari yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 112.857.578.84. Artinya, aktivitas penjualan PDAM Kota Ternate dalam kondisi tidak baik karena PDAM baru dapat merubah piutang menjadi kas dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu 71,33 hari pada tahun 2014 dan 75,44 hari pada tahun 2015.

Untuk meningkatkan rasio ini, PDAM harus dapat meningkatkan jumlah perputaran waktu piutang. Perputaran waktu piutang dapat dipercepat dengan menaikkan tarif denda bagi warga masyarakat yang terlambat membayar tagihan air.

10. Rasio Efektivitas Penagihan

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam melakukan penagihan kepada pelanggan.

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Penagihan

Tahun	Rekening Tertagih (Rp)	Penjualan Air (Rp)	Hasil (%)	Nilai Indikator
2014	7.210.736.050.00	34.086.142.858.00	0.21	1
2015	8.249.456.355.00	37.339.855.750.00	0.22	1

Rasio efektifitas penagihan yaitu kemampuan untuk memperoleh penerimaan dari penjualan air yang telah dilakukan. Semakin besar hasil rasio ini maka semakin baik kinerja perusahaan karena itu artinya perusahaan mampu mengelola penagihan air dengan sangat baik. Sebaliknya jika hasil rasio ini kecil, maka itu artinya kemampuan perusahaan dalam mengelola penagihan air terhadap pelanggan tidak/kurang baik. Pada PDAM kota Ternate, hasil rasio ini selama kurun waktu 2014 adalah 0.21% dengan jumlah rekening tertagih sebesar Rp. 7.210.736.050.00 dan jumlah penjualan air sebesar Rp. 34.086.142.858.00. pada tahun 2015, hasil rasio ini meningkat sedikit yaitu sebesar 0.22% dengan jumlah rekening tertagih sebesar Rp. 8.249.456.355.00 dan jumlah penjualan air sebesar Rp. 37.339.855.750.00. Indikator kinerja PDAM kota Ternate pada rasio ini hanya bernilai 1 yang mengindikasikan kemampuan PDAM kota Ternate dalam mengelola rekening tertagih dari para pelanggan tidak baik. Hal ini disebabkan karena jumlah penjualan air yang jauh lebih tinggi dibanding rekening yang telah ditagih dari pelanggan.

Untuk meningkatkan rasio ini, PDAM harus dapat meningkatkan pengelolaan rekening tertagih kepada pelanggan. Hal ini berkaitan erat dengan rasio sebelumnya dimana untuk meningkatkan pendapatan dari rekening

tertagih, jumlah waktu penagihan juga harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, kenaikan tarif denda diharapkan mampu menaikkan persentase kedua rasio ini.

Beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam perhitungan skor aspek keuangan belum mencapai nilai maksimum sesuai dengan Kepmendagri No 47 tahun 1999. Tabel 4.3 di bawah ini dapat menjelaskan perbedaan nilai rasio pada tahun 2014 dan 2015 dengan nilai rujukan.

Tabel 4.14
Tabel Perbandingan Nilai Rasio Tahun 2014 dengan Nilai Rujukan

No	Indikator	Rasio	Nilai	Nilai Rujukan	Keterangan
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	0.04	1	5	Tidak Tercapai
2	Rasio Laba terhadap Penjualan	0.06	2	5	Tidak Tercapai
3	Rasio Aktiva Lancar terhadap utang Lancar	0.81	1	5	Tidak Tercapai
4	Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Total Hutang	0.00	5	5	Tercapai
5	Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang	3.36	5	5	Tercapai
6	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	0.67	3	5	Tidak Tercapai
7	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	0.26	1	5	Tidak Tercapai
8	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	1.26	5	5	Tercapai
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang	71.33	4	5	Tidak Tercapai

No	Indikator	Rasio	Nilai	Nilai Rujukan	Keterangan
10	Efektivitas Penagihan	0.21	1	5	Tidak Tercapai
JUMLAH			28		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan PDAM kota Ternate yang tidak memenuhi standar nilai rujukan adalah sebanyak 7 rasio yaitu rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, rasio laba operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, rasio jangka waktu penagihan piutang, dan rasio efektivitas penagihan. Sedangkan rasio yang memenuhi standar nilai rujukan hanya sebanyak 3 rasio saja yaitu rasio hutang jangka panjang, rasio total aktiva terhadap total hutang, dan rasio aktiva produktif terhadap penjualan air.

Tabel 4.15
Tabel Perbandingan Nilai Rasio Tahun 2015 dengan Nilai Rujukan

No	Indikator	Rasio	Nilai	Nilai Rujukan	Keterangan
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	-0.03	0	5	Tidak Tercapai
2	Rasio Laba terhadap Penjualan	-0.06	0	5	Tidak Tercapai
3	Rasio Aktiva Lancar terhadap utang Lancar	0.80	1	5	Tidak Tercapai
4	Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Total Hutang	0.00	5	5	Tercapai
5	Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang	4.36	5	5	Tercapai

No	Indikator	Rasio	Nilai	Nilai Rujukan	Keterangan
6	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	0.67	3	5	Tidak Tercapai
7	Rasio Laba Operasi	0.28	1	5	Tidak
8	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	1.69	5	5	Tercapai
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang	75.44	4	5	Tidak Tercapai
10	Efektivitas Penagihan	0.22	1	5	Tidak Tercapai
JUMLAH			25		

Sama seperti tabel sebelumnya yaitu Tabel 4.4, pada Tabel 4.5 di atas juga menunjukkan bahwa kinerja PDAM kota Ternate pada tahun 2015 yang tidak memenuhi standar nilai rujukan adalah sebanyak 7 rasio yaitu rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, rasio laba operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, rasio jangka waktu penagihan piutang, dan rasio efektivitas penagihan. Sedangkan rasio yang memenuhi standar nilai rujukan hanya sebanyak 3 rasio saja yaitu rasio hutang jangka panjang, rasio total aktiva terhadap total hutang, dan rasio aktiva produktif terhadap penjualan air.

Banyaknya hasil yang tidak mencapai standar tidak terlepas dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh PDAM Kota Ternate. Pada tahun 2007 setelah PDAM Kota Ternate mengambil alih operasional dari Kabupaten

Halmahera Barat, Kinerja keuangan dari PDAM Kabupaten Halmahera Barat telah menunjukkan Kinerja yang kurang baik.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate, sejak operasinya pada tahun 1993, menggunakan sumur bor bawah tanah yang bersumber di mata air Ake Gaale yang terletak di kelurahan Sangaji, Ternate Utara, untuk menyuplai kebutuhan pelanggannya. Tercatat hingga 2015 lalu, jumlah pelanggannya mencapai 20.000 lebih.

Ternate sebagai kota yang mulai berkembang pesat dengan jumlah pelanggan mencapai 20.000 lebih sambungan membuat persediaan air bersih semakin sedikit. Hal ini mengakibatkan krisis air bersih mulai terasa di Ternate khususnya di daerah bagian Ternate Utara. Sekitar tahun 2014, ribuan pelanggan yang bermukim di wilayah utara kota mulai merasakan perubahan pada air yang mereka konsumsi dari PDAM. Air yang mereka gunakan sehari-hari telah *salobar* – dalam Bahasa daerah berarti payau (asin).

Ake Gaale, salah satu sumber mata air di Kota Ternate yang digunakan PDAM ternyata tercemar dan mulai mengering. Tercemar dan mengeringnya mata air Ake Gaale ini yang mengakibatkan air tawar menjadi asin. Sebab mengeringnya Ake Gaale adalah karena selain sebagian lahannya telah dikuasai PDAM, PDAM juga membuat sejumlah sumur-sumur air raksasa. Selain itu di luar lahan yang dikuasai PDAM, telah diserbu habis untuk pembangunan pemukiman sehingga menjadi salah satu penyebab keringnya sumber mata air itu.

Sumber mata air yang berjarak kurang lebih 300 meter dari bibir pantai Sangaji, dulunya banyak berdiri kolam ikan milik warga. Namun sekarang setitik

air juga sudah tidak ada. Selain sumber mata air yang kering karena dugaan kuat eksploitasi yang berlebihan dari PDAM, juga karena lahan dan vegetasi tutupan di areal sumber mata air ini telah beralih fungsi. Serangan karena kebutuhan lahan pemukiman yang tidak terkendali ini setidaknya juga harus menjadi bahan analisa dari mengeringnya sumber mata air ini.

PDAM terus mengambil air dengan tidak memedulikan dampak yang ditimbulkan nanti sehingga dampak buruknya, tidak hanya Ake Gaale yang mengering, sumur milik warga juga ikut mengering.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Artinya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan yang diberikan kuasa oleh pemerintah dalam mengelola sumber air, selain mendayagunakan sumber air juga harus dapat mengendalikan daya rusak air.

Tercemarnya sumber air Ake Gaale yang menyebabkan air menjadi asin dikarenakan terjadinya intrusi air laut ke sumber mata air Ake Gaale. Intrusi ini terjadi akibat eksploitasi besar-besaran oleh pihak PDAM. Intrusi air asin juga dapat terjadi secara alami hingga derajat tertentu pada sebagian besar akuifer pantai. Hal ini dikarenakan adanya hubungan hidrolik antara air tanah dan air laut. Karena air laut memiliki kadar mineral yang lebih tinggi dari air tawar, maka air laut memiliki massa jenis yang lebih tinggi, sehingga pergerakan air laut menuju air tawar cukup besar. Apalagi jika dilihat dari sisi geografis, Ternate adalah

sebuah pulau yang dikelilingi lautan yang tentunya sangat mudah mengalami tekanan air laut yang begitu besar.

Air asin yang dialirkan PDAM tidak bisa dikonsumsi warga karena bahaya untuk kesehatan karena akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Hingga kini, sebagian besar warga masyarakat di bagian kota Ternate Utara untuk keperluan memasak hingga memandikan bayi harus rela membeli di depot air.

Krisis air bersih yang dialami oleh sebagian besar warga masyarakat di Kota Ternate Utara yang diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan dari pihak PDAM menyebabkan pihak PDAM akhirnya mengambil keputusan untuk menggratiskan biaya rekening air kepada seluruh warga di beberapa kelurahan di daerah Ternate Utara. Tentu saja hal ini menjadi beban tersendiri bagi PDAM dimana PDAM harus terus memproduksi air dan didistribusikan ke seluruh masyarakat untuk dibeli dengan harapan PDAM akan mendapat pemasukan dari hasil penjualan air tersebut, namun pada kenyataannya sejak pertengahan tahun 2014 hingga saat ini penggratiskan beban rekening air kepada beberapa kelurahan di bagian Ternate Utara masih berlangsung. Dengan begitu, pemasukan yang diterima oleh PDAM otomatis berkurang.

Selain masalah eksploitasi sumber air yang berlebihan dan kurangnya menjaga kelestarian guna kelangsungan keberadaan air bersih di Ternate, ada juga bentuk eksploitasi lain dari PDAM yaitu produksi air minum dalam kemasan yang diberi nama “Ino Oke” .

Masih pada tahun 2014, PDAM Ternate meluncurkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk bisnis jual beli yang diberi nama Ake Qua (belakangan berganti nama jadi Ino Oke). Produk yang diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-27 PDAM itu, menurut direktur PDAM dalam satu hari, mereka bisa memproduksi Ino Oke sebanyak 1.200 kardus, sehingga jika sebulan, PDAM dapat memproduksi Ino Oke sebanyak 20 hingga 30 ribu kardus.

Upaya PDAM kota Ternate memproduksi air minum dalam kemasan “Ino Oke” yang diperjual belikan merupakan bentuk untuk menjadikan air menjadi suatu komoditi yang sebenarnya dari sisi manajemen keuangan bisa dijadikan sebagai tambahan pendapatan yang berguna bagi pembangunan PDAM kedepannya dan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan air bersih secara baik. Namun hingga saat ini, popularitas dari air kemasan “Ino Oke” belum bisa bersaing di pasaran seperti air kemasan lain yang telah lebih dulu dikenal masyarakat sehingga tentu saja PDAM Kota Ternate belum bisa menikmati hasil dari penjualan air minum dalam kemasan tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari berbagai masalah diatas membuat warga masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan air bersih untuk di konsumsi. Selain terjadi dampak negatif kepada masyarakat, dampak negatif pun turut dirasakan oleh PDAM yaitu tidak sesuainya jumlah biaya produksi air dengan jumlah penjualan yang disebabkan karena gratisnya rekening air pada warga di beberapa kelurahan Ternate Utara.

Untuk mengatasi berbagai masalah diatas, perlunya kesadaran warga untuk melakukan penghematan dalam pemanfaatan air bersih, karena tanpa

adanya penghematan penggunaan air maka semua upaya yang dilakukan dalam mencegah ancaman terjadinya krisis air bersih tidak akan membuahkan hasil maksimal misalnya dengan membuat sumur resapan dan pemanfaatan air bawah tanah di setiap kantor instansi pemerintah, swasta, termasuk sarana pendidikan dan pusat perdagangan, memperbanyak ruang terbuka hijau serta penanaman pohon untuk meningkatkan volume resapan air hujan kedalam tanah, dan menjaga hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan untuk menahan aliran air hujan ke laut sekaligus mencegah ancaman banjir.

Fungsi utama dari sumur resapan ini adalah sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Beberapa Fungsi sumur resapan, antara lain:

1. Pengendali banjir, banyak aliran permukaan yang dapat dikurangi melalui sumur resapan tergantung volume dan jumlah sumur resapan. Misalnya, sebuah kawasan yang jumlah rumahnya 500 buah, kalau masing-masing rumah membuat sumur resapan dengan volume 2 m³ berarti dapat mengurangi aliran permukaan sebesar 1.000 m³ air.
2. Konservasi airtanah, peresapan air melalui sumur resapan sangat penting mengingat adanya perubahan tata guna tanah di permukaan bumi sebagai konsekuensi dari perkembangan penduduk dan perekonomian masyarakat. Perubahan tata guna tanah tersebut akan menurunkan kemampuan tanah untuk meresapkan air. Hal ini mengingat semakin banyak tanah yang tertutupi oleh tembok, beton, aspal, dan bangunan lainnya yang tentunya berdampak meningkatnya laju aliran permukaan. Penutupan permukaan

tanah oleh permukiman dan fasilitas umum besar dampaknya bagiannya, berarti setiap kali turun hujan 30 mm akan ada 225.000 m³ air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah. Jumlah ini akan berkumpul dengan aliran permukaan dari kawasan lain pada lahan yang rendah sehingga dapat mengakibatkan banjir.

3. Menekan laju erosi, dengan adanya penurunan aliran permukaan maka laju erosi pun akan menurun. Apabila aliran permukaan menurun, tanah-tanah yang tergerus dan terhanyut pun akan berkurang. Dampaknya, aliran permukaan air hujan kecil dan erosi pun akan kecil. Dalam rencana pembuatan sumur resapan perlu dipertimbangkan faktor iklim, kondisi airtanah, kondisi tanah, tata guna tanah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor Iklim yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya curah hujan, semakin besar curah hujan di suatu wilayah berarti semakin besar sumur resapan yang diperlukan. Kondisi permukaan air tanah yang dalam, sumur resapan perlu dibuat secara besar-besaran karena tanah benar-benar memerlukan suplai air melalui sumur resapan. . Sebaliknya pada lahan yang muka airnya dangkal, sumur resapan ini kurang efektif dan tidak akan berfungsi dengan baik. Terlebih pada daerah rawa dan pasang surut, karena daerah ini memerlukan saluran drainase.

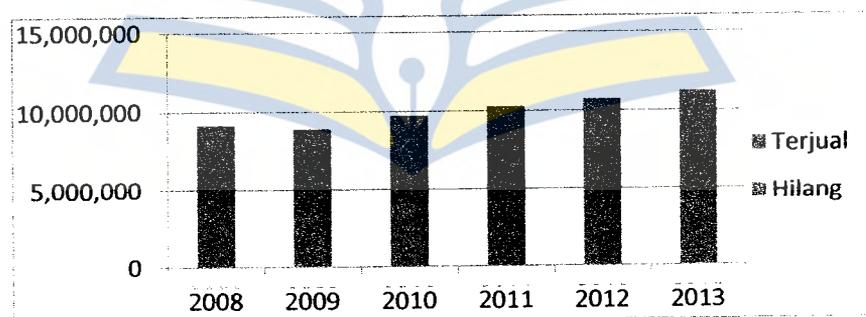
Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sumur resapan air di antaranya adalah :

1. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi.

2. Dapat menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang.
3. Dapat membantu mengurangi genangan banjir dan meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan.
4. mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.
5. Pembuatan sumur resapan juga dapat menarik tenaga kerja dan proyek padat karya melalui program pemberdayaan masyarakat misalnya
6. Cara pembuatan sumur resapan tidak memerlukan teknologi tinggi
7. Dengan adanya pengaturan aliran air, diharapkan pencemaran air tanah dapat ditekan serendah mungkin.

Selain terjadi krisis air bersih di beberapa kelurahan di Ternate Utara, masalah kobocoran air atau Non Revenue Water (NRW) juga tidak bisa dianggap remeh. Tercatat hingga akhir tahun 2013, PDAM kota Ternate telah memperoleh jumlah NRW yang cukup besar yaitu 4.183.696 m³.

Gambar 4.8. Grafik NRW PDAM Kota Ternate dari tahun 2008-2013 :



Sumber : Data Teknis PDAM 2015

Berdasarkan grafik di atas, angka kehilangan air PDAM Kota Ternate pada tahun 2008 adalah sebesar 4,014,130 m³ dan yang terjual sebesar 5,173,957 m³. Pada tahun 2009 jumlah kehilangan air sebanyak 3,505,258 m³ dan yang terjual sebanyak 5,443,820 m³. Selanjutnya pada tahun 2010, jumlah kehilangan air adalah sebesar 4,093,654 m³ dan yang terjual sebanyak 5,668,265 m³. Tahun 2011, jumlah kehilangan air meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4,201,127 m³ dan yang terjual sebanyak 6,109,127 m³. Di tahun 2012 terjadi penurunan kehilangan air dari tahun lalu sebanyak 4,178,516 m³ sedangkan yang terjual berjumlah 6,584,652 m³. Terakhir di tahun 2013, kembali mengalami kenaikan kehilangan air sebanyak 4,183,696 m³ dan jumlah air terjual sebanyak 7,064,579 m³.

Indonesia umumnya menganggap mudah masalah-masalah air minum, Di Ternate seperti yang dapat dilihat dari grafik diatas, tingkat kehilangan air secara nasional yang rata-rata lebih kurang 30-40%. Hal ini bisa disebabkan oleh konstruksi-konstruksi untuk air minum yang tidak memenuhi syarat, umur konstruksi mungkin berkisar antara 10-20 tahun karena belum ada pengaturan-pengaturan teknis yang terarah yang mengikat secara hukum kepada semua pelaksana yang menjalankan usaha dan konstruksi air minum.

Beberapa pokok masalah keteknikan dalam air minum berkenaan dengan kehilangan air antara lain yang pertama inkonsistensi teknis, dan kedua adalah fasilitas teknis air minum yang semakin menurun. Secara akademis, telah ada standar dan kaidah-kaidah teknis yang bila diikuti akan menghasilkan karya teknis rancang bangun yang baik dan efisien, seperti teknologi pemrosesan sumber air

permukaan (sungai atau danau) yang memiliki suatu kualitas (air baku) tertentu. Alur proses pembangunan (sarana air bersih), biasanya dilakukan dengan membangun waduk air baku (optional), pipa pembawa, bangunan-bangunan pengolahan air, sarana distribusi dan reservoir (*balance reservoir* di kota) dan sebagainya.

Namun berhubung dengan keterbatasan dana dan sumber daya lain, maka dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian (teknis) yang berakibat fungsi pelayanan menjadi menurun. "Life time" konstruksi yang secara normatif di desain untuk dapat mencapai umur 40 tahun, karena berbagai pertimbangan, berkurang menjadi 20 tahun saja yaitu dengan mengubah/menurunkan kualitas material. Pertimbangan yang sama dilakukan terhadap fasilitas reservoir atau waduk air baku dan reservoir kota yang untuk sementara tidak dibangun (di semua lokasi), karena pertimbangan biaya. Secara teknis, sasaran dan fungsi instalasi- instalasi tersebut cukup tercapai, namun *social cost* dan *maintenance cost* menjadi mahal.

Teknologi air minum termasuk kategori teknologi yang bersifat empiris; keakuratannya sangat tergantung kepada kondisi-kondisi tertentu, yang penanganannya memerlukan disiplin semua pihak yang terlibat dalam proses rancang bangun, untuk melaksanakannya sesuai dengan pedoman teknis yang ada (disahkan secara hukum, setelah diuji coba dan berkonsultasi dengan kelompok profesional). Sekarang sudah tersedia pedoman teknis yang memadai, tetapi karena satu dan lain hal, serta alasan-alasan tertentu, pedoman ini tidak diikuti, bukan hanya oleh para pekerja lapangan, para teknisi/insinyur atau administrator

keuangan, bahkan para birokrat dan pejabat tinggi setingkat Menteri, Dirjen, Walikota, juga mempunyai kecenderungan untuk tidak disiplin karena pedoman-pedoman tersebut tidak berkekuatan hukum.

Masalah teknis air minum ini, tidak mengandung risiko tinggi, tetapi risiko sosial yang terjadi sangat menonjol dan luas, umumnya timbul setelah melalui suatu kurun waktu tertentu apapun yang dilaksanakan, akhirnya bermuara pada kerugian masyarakat. Kebocoran air atau yang populer dikenal dikalangan air minum dengan istilah UFW (*un-accounted for water* atau kehilangan air yang tidak terhitung/tercatat) ini, tidak serta merta terjadi dan menjadi bocor kecuali bila terjadi bencana (*force majeure*), seperti gempa atau sebab lain. UFW ini terjadi sebagai akibat dari in-kompetensi yang terjadi pada seluruh siklus dan proses pembangunan dan administrasi pembangunan, meliputi antara lain proses perencanaan (dan pejabat perencana), pelaksanaan, pengawasan (dan pejabat pengawas), jasa konsultan/kontraktor (dan pengusahanya), faktor material, ketersediaan dana, pemeliharaan, dan sebagainya.

Dalam penyelenggaraannya, perencana yang seharusnya dapat merujuk kepada pedoman teknis, namun karena berbagai alasan, biasanya berhubung keterbatasan dana, dan tidak ada ikatan (hukum), maka perencanaan tersebut dapat dilakukan tanpa mengikuti pedoman teknis, sehingga pada waktu yang relatif singkat (3 sampai 4 tahun) kebocoran fisik mulai terjadi, bahkan kebocoran administrasi bisa terjadi lebih dini. Bila UFW ini diperhitungkan sebagai kerugian nasional terhadap 93.000 M³/det yang sekarang terpasang dengan harga jual Rp.1.000 per M³, maka kerugian akibat UFW adalah $40\% \times 93.000 \text{ ltr/dt} \times \text{Rph}$

1.000.-per M³ x 86400, atau = ± Rp 3.2 milyar per hari . Apabila UFW dapat ditekan menjadi 20%, maka diperoleh penghematan sebesar Rp 1.6 milyar per hari.

Dapat dikemukakan bahwa 90% dari seluruh PDAM yang ada (± 300 di seluruh Indonesia), tidak memiliki sarana untuk melakukan perhitungan jaringan perpipaan (untuk analisis hidraulis), sehingga tidak dapat melakukan pengendalian terhadap aliran air di dalam pipa-pipa tersebut. Dengan demikian, pemasangan pipa-pipa dilakukan secara sporadis, tanpa konsultasi teknis, sehingga terjadi ketidak seimbangan tekanan dan kapasitas air dalam pipa dan lagi-lagi pelanggan dan pemakai adalah pihak yang secara langsung dirugikan. Dalam hal pengaliran dalam suatu sistem perpipaan yang dilaksanakan secara bergilir (karena kekurangan air), maka praktis seluruh *water meter* di kota tersebut sudah menjadi tidak akurat; semua pihak merugi. Di satu pihak, pelanggan merugi karena (mungkin) *water meter* dibaca berlebihan, atau diuntungkan, di lain pihak, PDAM dirugikan karena pembacaan yang rendah (*under score*).

Secara teknis *water meter* tersebut akan selalu dapat berputar karena aliran air ataupun karena udara (karena pipa kosong), atau terjadi macet (tidak berputar), bila kemasukan lumpur; kasus-kasus itu berpotensi konflik. Hal tersebut hanyalah beberapa contoh dari sederetan panjang contoh lain dalam sektor air minum yang terjadi sehari-hari, yang kesemuanya perlu didudukkan secara hukum. Dari sudut teknis, kasus dan masalah-masalah ini dapat direduksi seminimum mungkin bila ada NSPM (norma, standar, manual) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga semua pihak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Untuk menyikapi kondisi ini, PDAM Ternate berupaya mengurangi tingkat kehilangan air dengan meminimalkan kebocoran pipa. PDAM dapat menurunkan tingkat kehilangan air, diperlukan hal-hal berikut:

1. Perencanaan dibuat dengan konsep yang matang dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam program penurunan kehilangan air yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada pada PDAM.
2. Komitmen mulai dari top manajemen (direksi) dan seluruh staf pelaksana baik di bidang teknik maupun administrasi bahwa program ini adalah program bersama, serta perlunya dukungan dari *stakeholder* terhadap kesuksesan program penurunan kehilangan air.
3. Seluruh tahapan program dilaksanakan secara konsekuen dan tuntas sesuai tahapan sampai mendapatkan hasil yang diharapkan.
4. Memiliki personil yang mampu melaksanakan program yang terkait dalam bidang masing masing.
5. Mencari terobosan dalam mendapatkan dana dan strategi penyusunan anggaran yang dikaitkan dengan perbaikan rutin fasilitas yang ada, sehingga mengurangi pengeluaran khusus yang seolah-olah tertuju pada program khusus kehilangan air semata.
6. Dalam operasi rutin *zoning* diperlukan pengontrolan dan evaluasi yang terus menerus sehingga nilai kehilangan air yang telah berhasil diturunkan tidak menjadi naik kembali. Selain itu perlu dicamkan oleh pihak manajemen PDAM bahwa program penurunan tingkat kehilangan air sama dengan melaksanakan manajemen di bidang lainnya, di mana perencanaan,

operasional/pelaksanaan, evaluasi, monitoring/kontrol, harus dilaksanakan secara terus menerus dengan mempergunakan SOP secara konsekuen.

Secara teknis, untuk mengurangi tingkat kehilangan air PDAM perlu melakukan penggantian meter air, pencarian sambungan ilegal, dan perbaikan pembacaan meter. Melihat kondisi meter air yang terpasang dan usianya kebanyakan di atas 5 tahun, akurasi peneraan tahun 2002 menggambarkan 48% meter air pelanggan tidak akurat, yang merugikan PDAM (55,17%) lebih tinggi dibanding yang merugikan pelanggan (27,59%). Berdasarkan hal ini dilakukan program penggantian meter air. Prioritas penggantian meter air pelanggan yaitu meter mati, rusak, buram dan berdasarkan hasil kalibrasi yang memiliki penyimpangan yang tinggi dan yang rendah sekalipun.

Setelah dilakukan penggantian meter air, sekitar 60,7% konsumsi meningkat dan 39,3% konsumsi menurun dan secara rata-rata total peningkatan air terjual dengan penggantian meter air sekitar 7,25%. Di dalam program penggantian meter ini juga termasuk pemasangan meter induk pada instalasi, yang semula hanya dengan perhitungan kapasitas pompa. Meter induk yang rusak diganti dengan jenis meter elektromagnetik, ultrasonik dan turbin water meter, dan secara berkala dilakukan peneraan meter induk.

Dengan penggantian meter induk ini perhitungan air yang didistribusikan dengan hanya memakai pompa dan alat Thomson jauh lebih tinggi dibanding pencatatan setelah penggantian meter. Sehingga dengan penggantian meter induk ini dapat menekan tingkat kehilangan air. Dari pemantauan diketahui, sambungan ilegal antara lain disebabkan pemutusan sambungan rumah, sambungan ilegal

yang dilakukan karyawan PDAM, dan sambungan ilegal betul betul karena disambung dengan tidak melalui proses dari PDAM.

Sambungan ilegal yang dilakukan oknum karyawan penanganannya dengan tindakan terhadap karyawan yang bersangkutan dipecat, diberi peringatan dan turun jabatan. Ini dilakukan sebagai *punishment*, dan sebagai contoh bagi karyawan lain sehingga tidak berbuat yang sama. Sedangkan untuk perbaikan pembacaan meter, kegiatan yang dilakukan adalah diawali dengan memberi motivasi kepada pembaca meter bahwa mereka adalah ujung tombak perusahaan yang menentukan hasil yang paling baik bagi perusahaan, sehingga mereka akan termotivasi untuk bekerja secara baik dan benar.

Melakukan rotasi/mutasi pembaca meter, sehingga kesempatan untuk membuat kesepakatan yang tidak baik dengan pelanggan menjadi kecil, karena pembaca meter tidak terlalu lama dalam satu daerah yang sama. Melakukan sosialisasi kepada pelanggan yang rumahnya selalu terkunci/kosong untuk memberikan data pemakaian air. Penggunaan *hand terminal* untuk pembacaan meter, dan juga dilakukan *outsourcing* pembacaan meter.

Gambar 4.9. Berikut adalah Grafik Penggantian Meter Air Pelanggan



Sumber : Data Teknis PDAM 2015

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari kurun waktu 2007 hingga 2014 mengalami kenaikan yang cukup banyak. Pada tahun 2007 jumlah penggantian meter sebanyak 220 buah. Tahun 2008 penggantian meter naik sebanyak 622 buah dan pada tahun 2009 sebanyak 1464 buah. Ditahun selanjutnya yaitu 2010, jumlah penggantian meter sebanyak menurun menjadi 1449 buah dan ditahun berikutnya yaitu 2011 juga mengalami penurunan jumlah penggantian meter menjadi 1332 buah. Pada tahun 2012, jumlah penggantian meter naik drastis sebanyak 1832 buah dan ditahun selanjutnya 2013 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 3112 buah. Pada tahun 2013 PDAM kota Ternate juga naik cukup banyak sebesar 4279 buah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberhasilan penurunan tingkat kehilangan air akan menurunkan pula tingkat kerugian PDAM dan dapat pula menaikkan laba karena antara lain: air yang terjual menjadi lebih banyak serta terjadi penghematan sehingga paling tidak kinerja keuangan dan cakupan pelayanan menjadi lebih baik.

Keberhasilan menurunkan tingkat kehilangan air akan meningkatkan laba dan meningkatkan pula nilai kinerja keuangan dan nilai kinerja perasional PDAM. PDAM akan mendapat nilai tambahan apabila dalam suatu tahun buku dibandingkan tahun buku sebelumnya ada perbaikan terhadap minimal salah satu dari indikator berikut ini : peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif, peningkatan rasio laba terhadap penjualan, peningkatan cakupan pelayanan, dan penurunan tingkat kehilangan air.

Penurunan tingkat kehilangan air akan berpengaruh secara positif terhadap penilaian kinerja keuangan PDAM. Oleh karena itu, penurunan tingkat kehilangan air harus berusaha terus diwujudkan. Keberhasilan manajemen PDAM menurunkan tingkat kehilangan air hanya dapat terwujud apabila di dukung komitmen didalam PDAM sendiri mulai dari manajemen puncak sampai staf pelaksana untuk mencapai target yang disepakatidan melaksanakannya dengan tuntas setiaptahapan yang sudah diprogramkan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat sebagai *stakeholder*.

Selain masalah penggratisan beban rekening air kepada beberapa kelurahan di bagian Ternate Utara oleh PDAM dan tingkat kehilangan air yang cukup tinggi, cara umum dapat dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan operasional air yaitu masalah tarif dasar air, dimana tarif air yang didasarkan dalam penentuan harga pokok penjualan air berdasarkan tarif tahun 2008 (lampiran 6). Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya sesuai dengan prinsip yang sehat dalam pengelolaan suatu usaha guna keberlangsungan usaha (khususnya perusahaan yang jenis kegiatannya melaksanakan pelayanan publik) diperlukan suatu sumber pendanaan yang minimal sama dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Sumber pendanaan untuk kegiatan perusahaan yang semata-mata mengandalkan pembiayaan pemerintah/bantuan lainnya bukan merupakan suatu pilihan yang tepat saat ini dan yang akan datang. Karena itu, PDAM dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan usahanya bersumber dari pendapatan yang diperoleh dari pelanggan PDAM.

Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) di capai dari hasil perhitungan tarif rata-rata yang minimal sama dengan biaya dasar.

Untuk pengembangan PDAM, tarif ditentukan berdasarkan biaya dasar ditambah tingkat keuntungan tertentu. Disamping di tetapkannya prinsip pemulihan biaya, untuk pengembangan PDAM, Permendagri Nomor 23 memberikan peluang kepada PDAM untuk menetapkan suatu tingkat keuntungan tertentu berdasarkan rasio keuntungan terhadap aktiva produktif sebesar 10%.

Permasalahan tarif dasar air tersebut di atas, perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan, sehingga penetapan tarif dapat menentukan harga pokok penjualan air riil sehingga penentuan pendapatan operasional air dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dan PDAM akan mendapatkan keuntungan sesuai yang direncanakan. Langkah-langkah yang perlu diambil yaitu:

1. Efisiensi pemakaian air dapat dicapai dengan penetapan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi dan dikenakan pada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.
2. Transparansi atas proses perhitungan dan penetapan tarif air melalui penyampaian informasi dan penjangkaran aspirasi *stakeholder*. Terkait dengan sifat usaha PDAM yaitu pelayanan publik, proses penyusunan tarif telah didahului dengan suatu kajian yang mendalam mengenai kemampuan masyarakat, ketersediaan air baku, dan masalah lingkungan. Untuk itu diperlukan sebanyak mungkin aspirasi dari

stakeholder sebagai masukan kepada PDAM dalam mengusulkan suatu penyesuaian tarif baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, penetapan tarif didasarkan pada prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan air baku.

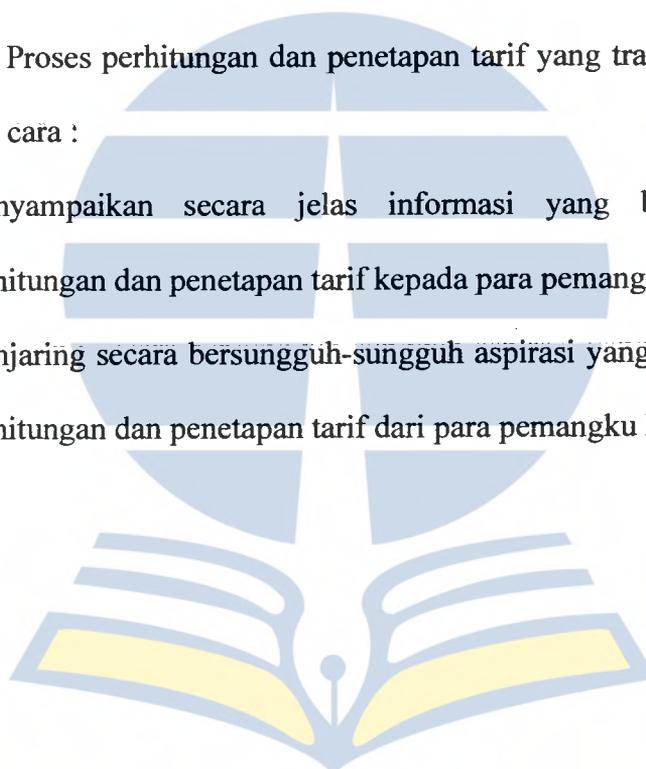
Pertimbangan penetapan tarif yaitu:

1. Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Propinsi.
2. Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% dari pendapatan masyarakat pelanggan.
3. Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan
4. Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Sehingga PDAM harus mempertimbangkan:
 - a. Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya
 - b. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan rata-rata minimal atau sama dengan biaya dasar

- c. Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar
- d. Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10%.
- e. Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif. Tarif progresif diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi. Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan dilakukan PDAM dengan cara :

1. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan
2. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.



BAB V

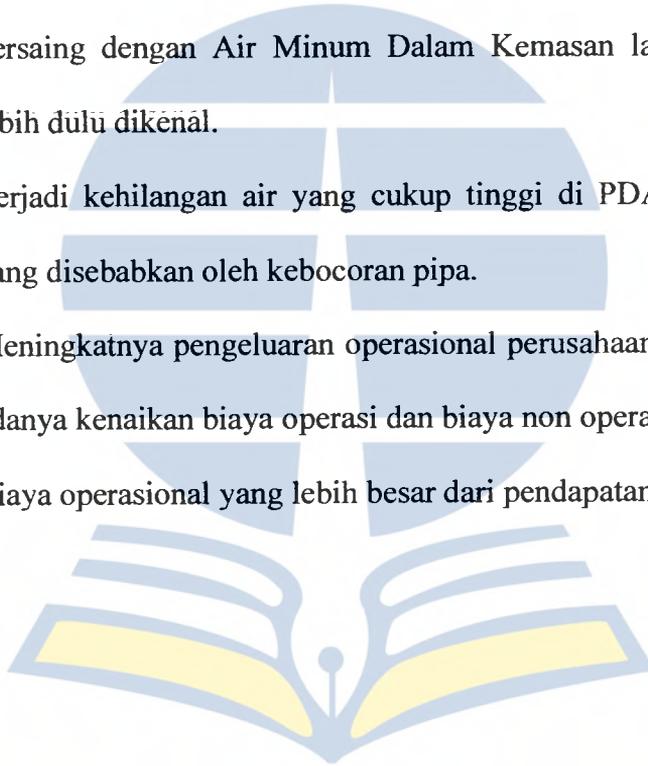
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penilaian kinerja berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja PDAM di kota Ternate sesuai dengan masalah pokok dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1), tentang tingkat keberhasilan PDAM, PDAM Kota Ternate di tahun 2014 memiliki nilai kinerja aspek keuangan sebesar 46,6 dengan katagori “Cukup”, dan di tahun 2015 mengalami penurunan kinerja sebesar 41,6 dengan kategori “Kurang”.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan PDAM kota Ternate, diperoleh kesimpulan bahwa penurunan kinerja PDAM pada tahun 2015 di sebabkan karena:
 - a. Kota Ternate sebagai daerah yang sedang berkembang sehingga kebutuhan akan air bersih semakin meningkat sementara persediaan air semakin sedikit.
 - b. Eksploitasi besar besaran yang dilakukan oleh PDAM Kota Ternate dan daerah dekat sumber air yang mulai dipadati masyarakat juga menjadi penyebab semakin berkurangnya persediaan air.

- c. Sumber mata air bersih mulai tercemar air laut sehingga menimbulkan rasa asin yang menyebabkan warga masyarakat di bagian Ternate Utara digratiskan biaya rekening airnya oleh PDAM.
- d. PDAM memproduksi Air Minum Dalam Kemasan “Ino Oke” yang hingga saat ini masih menjadi polemik karena di sisi lain masih ada warga yang kesulitan air bersih sementara PDAM justru menambah eksploitasi Air bersih menjadi barang yang diperjual belikan (distribusi yang tidak merata).
- e. Hasil penjualan Air Minum Dalam Kemasan “Ino Oke” belum terlalu menjanjikan karena masih baru diluncurkan dan belum bisa bersaing dengan Air Minum Dalam Kemasan lainnya yang telah lebih dulu dikenal.
- f. Terjadi kehilangan air yang cukup tinggi di PDAM Kota Ternate yang disebabkan oleh kebocoran pipa.
- g. Meningkatnya pengeluaran operasional perusahaan, terutama karena adanya kenaikan biaya operasi dan biaya non operasi.
- h. Biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan air.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peningkatan suatu kinerja aspek keuangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan internal terutama dalam pemanfaatan biaya yang dikeluarkan dan memfungsikan sarana dan prasana secara efektif dan efisien.
2. Meninjau ulang penetapan tarif air minum PDAM kota Ternate dikarenakan nilai jual rata-rata air per m³ yang masih di bawah biaya produksi air per m³.
3. Melakukan pengecekan/perawatan secara rutin dan berkala pada jaringan/pipa instalasi sehingga mampu menekan angka kehilangan air dan mampu mengurangi biaya operasional untuk perbaikan pipa instalasi untuk mengurangi tingkat kebocoran/kehilangan air.
4. Membuat sumber air/sumur resapan sebagai cadangan air tanah untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk masyarakat.
5. Mempromosikan air minum dalam kemasan “Ino Oke” agar lebih dikenal publik sehingga lambat laun diharapkan penjualannya akan semakin meningkat sehingga pendapatanpun akan ikut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wijanarko, 2006. Summary of Citing Internet Situs, Kinerja PDAM belum memenuhi standar. (online), (<http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006/>)

Davey, K.J, 2000. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Penerjemah Amanullah dkk. UI-Press, Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan PDAM.

Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri, 1999. Pokok- pokok Pemikiran Keputusan Mendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, Jakarta.

Dwiyanto Agus, 2005. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta 20 Mei 1995.

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2015. Kinerja PDAM 2015, Wilayah IV Papua-Maluku NTB-NTT-Bali, Jakarta.

Manulang, 2006. Pengantar Ekonomi Perusahaan. Ghalla Indonesia, Jakarta.

Mulyadi dan Setyawan Johny, 2000. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Cetakan Kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2001. Balanced scorecard ; Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandakan Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan, Cetakan Kesatu, enerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sri Mindarti Ceacilia, 2004. Balanced Scorecard sebagai alternatif untuk mengukur kinerja. Fokus Ekonomi, 3(1), April 2004, hal. 52 – 64.

UUD 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

<https://gegaukblog.wordpress.com/2012/09/21/manajemen-penurunan-tingkat-kehilangan-air-dan-pengaruhnya-terhadap-penilaian-kinerja-pdam/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Intrusi_air_asin

Jurnal Internasional:

<http://ipedr.com/vol16/8-ICBER2011-A00022.pdf>

<http://www.nachc.com/client/documents/GBG%206.pdf>

<http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/F/FinAccPManSt09.pdf>

<http://lp3m.asia.ac.id/wp...naan-analisis-du-pont.pdf>

<http://fahmina.or.id/pbl/Penelitian%20dan%20analisa/bs9p16-17.pdf>



Lampiran 1

Data Instalasi Sumber Air dan Kapasitas Produksi

Lokasi Instalasi	SW	DW	B/I	P	Kapasitas Produksi
Akegaale	7	-	2	12	105 Ltr/det
Kalumpang	6	2	-	8	110 Ltr/det
Skep / Soa	1	3	-	4	60 Ltr/det
Ubo-Ubo	3	2	-	5	70 Ltr/det
Kalumata	5	-	-	6	43 Ltr/det
Togafo	1	1	-	2	10 Ltr/det
Kulaba/Bula	2	-	-	2	10 Ltr/det
Fitu/ Kastela	-	2	1	2	16 Ltr/det
Jumlah	25	10	3	41	425 Ltr/det



Lampiran 2

Data Kapasitas Pompa PDAM Kota Ternate Desember 2015

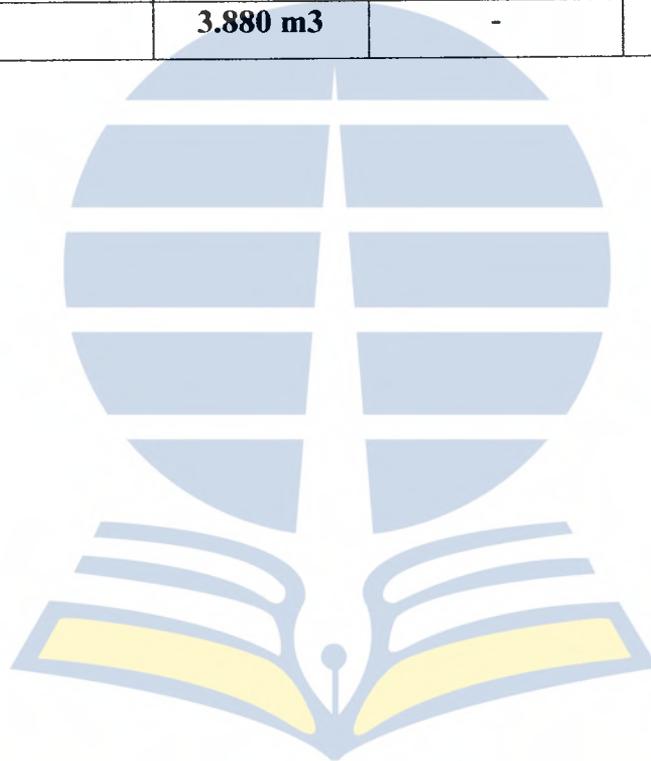
No	Instalasi	Lokasi	Kapasitas (L/Det)
I	Akeegaale		
1	Sumur I	Akeegaale	17
2	Sumur II	Akeegaale	9
3	Sumur III	Akeegaale	12
4	Sumur IV	Akeegaale	10
5	Sumur V	Akeegaale	10
6	Sumur VI	Akeegaale	11
7	Sumur VII	Akeegaale	6
8	Bron I Pompa I	Akeegaale	12
9	Bron II Pompa I	Akeegaale	11
10	Bron II Pompa II	Akeegaale	14
11	Bron II Pompa III	Akeegaale	17
12	Bron II Pompa IV	Akeegaale	-
Jumlah			129
II	Togafo		
1	Sumur I	Togafo	4
Jumlah			4
III	Kulaba		
1		Kulaba	5
Jumlah			5
IV	Bula		
1	Sumur I	Bula	5.5
Jumlah			5.5
V	Kalumpang		
1	Sumur I	Belakang Benteng	12
2	Sumur II	Jl Alkhairat	9
3	Sumur III	Jl Alkhairat	10
4	Sumur IV	Jl Yos Sudarso	15
5	Sumur V	Jl Yos Sudarso	17
6	Sumur VI	Jl Yos Sudarso	6
7	Sumur VII	Jl Alkhairat	25
8	Sumur VIII	Belakang Benteng	25
Jumlah			119
VI	Skep I		
1	Sumur I	Skep	8
Jumlah			8

VII	Skep II		
1	Sumur I	Soa	16
2	Sumur II	Pekuburan Islam	9
3	Sumur III	Skep	30
Jumlah			55
VIII	Ubo-Ubo		
1	Sumur I	Ubo-Ubo	17
2	Sumur II	Ubo-Ubo	20
3	Sumur III	Ubo-Ubo	6
4	Sumur IV	Ubo-Ubo	17
5	Sumur V	Ubo-Ubo	10
Jumlah			70
IX	Falaraha		
1	Sumur I	Jl. Falaraha	6
2	Sumur II	Jl. Falaraha	5
3	Sumur III. A	Jl. Falaraha	6
4	Sumur III.B	Jl. Falaraha	6
5	Sumur IV	Jl. Falaraha	8
6	Sumur V	Jl. Falaraha	8
Jumlah			39
X	Fitu		
1	Sumur I	Fitu	10
Jumlah			10

Lampiran 3

Data Reservoir & Station Booster PDAM Kota Ternate

No	Uraian	Volume	Elevasi	Pompa Booster
1	Reservoir Skep	1.680 m ³	+ 60m'	5 Unit – 87 ltr/det
2	Reservoir Facey Bawah	500 m ³	+ 70 m'	2 Unit – 18 ltr/det
3	Reservoir Ubo-Ubo	500 m ³	+ 70 m'	3 Unit – 25 ltr/det
4	Reservoir Falaraha	100 m ³	+ 60 m'	
5	Reservoir Ngade	100 m ³	+ 50 m'	
6	Reservoir Tabahawa ²	300 m ³	+ 135 m'	1 Unit – 4 ltr/det
7	Reservoir Jan ²	100 m ³	+ 205 m'	
8	Reservoir Facey Atas ²	100 m ³	+ 180 m'	
9	Reservoir Moya ³	300 m ³	+ 210 m'	
10	Reservoir Fora ¹²³	300/50/50	+110/205/295	2 Unit – 10 l/d CS
Jumlah		3.880 m³	-	13 Unit – 144 l/d



Lampiran 4

Data Jaringan Pipa, Transmisi, dan Distribusi

Dimensi/ Diameter	Transmisi	Distribusi
DN-315 mm	800 m'	1.276 m'
DN-250 mm	1.418 m'	1.382 m'
DN-200 mm	3.505 m'	6.343 m'
DN-160 mm	975 m'	13.641 m'
DN-110 mm	2.066 m'	25.258 m'
DN-90 mm	-	21.119 m'
DN-75 mm	-	39.445 m'
DN-63 mm	-	43.789 m'
DN-50 mm	-	12.067 m'
Jumlah	8.764 m'	164.300 m'



Lampiran 5

Daftar Tarif Air 2013

Kel	Golongan	Tarif Air (Rp./M3) 1-10 m3	Tarif Air (Rp./M3) >10 m3	Beban Tetap D. MTR	Beban Tetap Administrasi
1-A	Hidran/kran umum	750	750	4.500	3.000
1-B	KM/WC umum	1.000	1.250	4.500	3.000
1-C	Tempat Ibadah	1.500	1.750	4.500	3.000
1-D	Sekolah, RS Pemerintah, Panti Asuhan& Yayasan Sosial.	1.750	2.750	4.500	3.000
2-A	Rumah Tangga 1 Bangunan <50 M2, pakai air 15M3/bulan	2.000	3.000	4.500	5.00
2-B	Rumah Tangga 2 Bangunan 50- 120M2, pakai air 25M3/bulan	2.250	3.100	4.500	5.500
2-C	Kios, Salon, Penjahit, Biro Jasa KM/WC Komersil	2.500	3.250	4.500	5.500
2-D	Penginapan, Kos-Kosan, Rumah makan, Cafe, Bengkel service	2.750	3.500	4.500	5.500
3-A	Rumah tangga 3 bangunan > 150 M2 pakai air >25 M3/bulan	3.500	4.750	4.500	10.500
3-B	Instansi penerintah/ TNI/Polri, RS swasta, Klinik, Praktek dokter	3.750	5.000	4.500	10.500
3-C	Apotek, Depot Air, Laundry, Cuci mobil, Lembaga asing	4.000	5.250	4.500	10.500
3-D	Restaurant, Perusahaan pabrik dan gudang	4.200	5.500	4.500	10.500
4-A	Pelabuhan laut/ Udara/ Penyebrangan	7.500	7.500	4.500	21.500
4-B	Kelompok khusus	-	-	-	-

NERACA PDAM KOTA TERNATE
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	PER 31-Dec-15	PER 31-Dec-14	NAIK / TURUN Rp.	URAIAN	PER 31-Dec-15	PER 31-Dec-14	NAIK / TURUN Rp.
AKTIVA				PASSIVA			
AKTIVA LANCAR							
Kas / Bank	1,181,708,313.06	1,158,857,406.63	22,850,906.43	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Deposito berjangka	0.00	0.00	0.00	Hutang Usaha	967,268,820.00	416,896,050.00	550,372,770.00
Piutang rekening air	8,249,456,355.00	7,210,736,050.00	1,038,720,305.00	Hutang lainnya	32,232,000.00	4,756,000.00	27,477,000.00
Piutang rekening non air	119,150,741.00	88,234,969.19	30,915,771.81	Hutang bunga pinjaman dan denda	13,873,938,310.05	13,873,938,310.05	0.00
Piutang Ragu-ragu	0.00	0.00	0.00	Pinjaman pemerintah pusat	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Rekening	(1,584,773,866.48)	(1,397,529,115.17)	(187,244,751.31)	Hutang Pajak (PPH Badan)	712,639,000.00	240,417,000.00	472,222,000.00
Piutang pajak	0.00	0.00	0.00	Hutang Pajak (PPN)	226,610,145.00	62,132,727.00	164,477,418.00
Rupa-rupe piutang lainnya	145,735,525.50	147,135,525.50	(1,400,000.00)	Hutang Pajak (PPH 22)	36,326,246.00	8,775,130.00	27,551,116.00
Persediaan bahan operasi lainnya	4,465,699,355.30	4,488,317,626.30	(22,618,271.00)	Hutang Pajak (PPH 21)	5,472,427.00		1,242,300,304.00
Pembayaran dimuka	260,188,650.00	166,688,650.00	93,500,000.00	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,854,686,948.05	14,608,914,217.05	2,484,600,608.00
JUMLAH AKTIVA LANCAR	12,837,165,073.38	11,862,441,112.45	974,723,960.93	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
AKTIVA TETAP				Pinjaman pemerintah pusat	0.00	0.00	0.00
Tanah	1,672,898,506.21	1,612,898,506.21	60,000,000.00	Pinjaman Koperasi	0.00	0.00	0.00
Instalasi Sumber air	6,507,084,364.47	4,279,783,261.70	2,227,301,102.77	Bunga Masa Tenggang-Pinjaman D.Negeri	0.00	0.00	0.00
Instalasi Pompa	24,367,499,629.85	16,614,123,460.59	7,753,376,169.26	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00
Instalasi Pengalihan	2,391,834,789.00	2,391,834,789.00	0.00				
Instalasi Transmisi & Distribusi	50,874,718,058.73	34,295,787,854.59	16,578,930,204.14	KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
Bangunan / Gedung	3,243,866,950.00	2,744,499,950.00	499,366,999.99	Uang jaminan langganan	0.00	0.00	0.00
Peralatan dan perlengkapan	639,083,169.00	600,669,519.00	38,413,650.00	Cadangan Dana lainnya	224,901,977.00	455,606,591.00	(230,704,614.00)
Kendaraan / alat pengangkutan	2,258,665,034.00	2,163,818,359.00	94,846,675.00	Cadangan Dana Meter	0.00	0.00	0.00
Inventaris / perabot kantor	1,975,495,254.00	1,589,788,584.00	306,206,670.00	JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN	224,901,977.00	455,606,591.00	(230,704,614.00)
Akumulasi penyusutan	(37,078,343,588.06)	(30,066,125,889.30)	(7,012,217,698.76)	MODAL DAN CADANGAN			
Nilai buku aktiva tetap	56,852,802,167.20	36,306,578,394.79	20,546,223,772.41	Keayaan Pemda yang dipisahkan	1,173,890,154.00	1,173,890,154.00	0.00
JUMLAH AKTIVA TETAP	56,852,802,167.20	36,306,578,394.79	20,546,223,772.41	Modal sumbangan dan hibah	148,480,200.00	148,480,200.00	0.00
AKTIVA LAIN-LAIN				Penyertaan M. P yg bim ditetapkan statusnya	54,845,070,919.52	33,054,760,618.35	21,790,310,301.17
Bahan Instalasi	0.00	0.00	0.00	Cadangan tujuan	0.00	0.00	0.00
Aktiva Tetap Lain dalam Penyelesaian	180,540,305.00	211,629,605.00	(31,089,300.00)	Cadangan umum	0.00	0.00	0.00
Aktiva yang tidak digunakan	155,794,863.83	2,026,963,752.17	(1,871,169,088.34)	Saldo rugi tahun lalu	732,558,988.90	994,199,264.59	(261,640,275.69)
Aktiva tak berwujud	211,048,971.60	266,635,377.85	(55,786,406.25)	Label/(Rugi) tahun berjalan	(2,742,238,006.46)	240,597,197.27	(2,982,835,203.73)
Bantuan ke Kantor Cabang IKK	0.00	0.00	0.00	JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	54,157,762,255.96	35,611,927,434.21	18,545,834,821.75
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	547,383,940.43	2,505,428,735.02	(1,958,044,794.59)				
TOTAL AKTIVA	70,237,351,181.01	50,674,448,242.26	19,562,902,938.76	TOTAL PASSIVA	70,237,351,181.01	50,674,448,242.26	19,557,430,511.75

Mengetahui
PDAM Kota Ternate
[Signature]
H. Syaiful Djalaf, SE
Direktur

Diperiksa Oleh :
Kasie Administrasi
[Signature]
Abd. Gani Hatari, SE
Npp. 029 01 64

Dibuat Oleh :
Kasie Keuangan
[Signature]
Hi. Kartini Kaldati, SE
Npp. 032 10 62

Lampiran 7



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TERNATE
JL. Batu Angus No.10

LAPORAN LABA RUGI

Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
LAPORAN KONSOLIDASI

URAIAN	2015	2014	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air	37.339.855.750,00	34.086.142.858,00	3.253.712.892,00	9,54
Pendapatan Non Air	3.853.160.525,00	4.012.243.100,00	(159.082.575,00)	(3,96)
Jumlah Pendapatan Usaha	41.193.016.275,00	38.098.385.958,00	3.094.630.317,00	8,12
Biaya Langsung Usaha				
Biaya Operasi Sumber Air	15.313.219.018,00	14.217.901.186,00	1.095.317.832,00	7,70
Biaya Pemeliharaan Sumber Air	694.846.600,00	699.400.519,00	(4.553.919,00)	(0,65)
Biaya Air Baku	349.528.170,00	403.679.445,00	(54.151.275,00)	(13,41)
Biaya Penyusutan Sumber Air	2.485.033.509,23	1.552.520.180,35	932.513.328,88	60,06
Biaya Operasi Pengolahan Air	1.031.704.685,00	1.171.988.530,00	(140.283.845,00)	(11,96)
Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	531.500,00	11.210.000,00	(10.678.500,00)	(95,25)
Biaya Penyusutan Pengolahan Air	133.427.463,36	152.488.529,92	(19.061.066,56)	(12,50)
Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi	2.448.553.710,00	2.353.388.495,00	95.165.215,00	4,04
Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi	1.358.660.754,00	2.580.668.880,00	(1.222.008.126,00)	(47,35)
Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi	3.787.796.614,43	2.709.618.426,18	1.078.178.188,25	39,79
Jumlah Biaya Langsung Usaha	27.893.302.624,02	25.852.864.181,45	1.760.437.932,57	6,77
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	13.589.714.250,98	12.245.521.766,55	1.344.192.484,43	10,97
Biaya Tidak Langsung Usaha				
Biaya Pegawai	8.563.303.033,00	6.909.579.749,00	1.653.723.284,00	23,93
Biaya Kantor	1.177.777.578,00	1.065.851.113,00	111.926.465,00	10,50
Biaya Hubungan Langganan	453.851.956,00	418.804.805,00	35.047.151,00	8,36
Biaya Penelitian Dan Pengembangan	343.512.500,00	505.515.000,00	(162.002.500,00)	(32,04)
Biaya Pemeliharaan	1.009.536.610,00	697.851.670,00	311.684.940,00	44,66
Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang	188.613.519,50	0,00	188.613.519,50	-
Rupa-rupa Biaya Umum	4.619.257.879,72	1.836.360.930,25	2.782.896.949,47	151,54
Beban Penyusutan	(603.343.186,35)	598.650.769,96	(1.201.993.956,31)	(200,78)
Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha	15.752.509.889,87	12.032.614.637,21	3.719.895.852,66	30,91
LABA (RUGI) USAHA	(2.162.795.638,89)	212.907.729,34	(2.375.703.368,23)	(***)
Pendapatan Dan Beban Lain-lain				
Pendapatan Di Luar Usaha	19.962.259,43	268.106.467,93	(248.144.208,50)	(92,55)
Beban Pajak	(34.074.801,00)	0,00	(34.074.801,00)	-
Rupa-rupa Biaya Kerugian	(565.329.826,00)	(240.417.000,00)	(324.912.826,00)	135,14
Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain	(579.442.367,57)	27.689.467,93	(607.131.835,50)	(***)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.742.238.006,46)	240.597.197,27	(2.982.835.203,73)	(***)

Ternate, 5 Maret 2016

Diperiksa Oleh
Kepala Bagian Admigrasi,

ABDUL GANI HATARI, SE

Disusun Oleh
Kasie Keuangan,

HJ.KARTINI KADATI, SE

Mengetahui/Menyetujui
Direktur,

Jahm



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TERNATE**
Jl. Batu Angus No.10

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2014
LAPORAN KONSOLIDASI

Arus Kas dari aktivitas operasi	
laba sebelum pajak dan pos luar biasa	240.597.197,27
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(17.936.600,00)
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - penyusutan	5.013.277.906,37
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - amortisasi	(50.483.012,56)
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - peyisihan piutang - beban bunga	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang usaha	(699.321.319,19)
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang lain-lain	8.550.000,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - persediaan	(1.030.206.556,00)
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - pembayaran dimuka	37.349.227,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban usaha	315.962.336,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban non usaha	(12.436.840,00)
kenaikan (penurunan) hutang operasional - beban ymh dibayar	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - pendapatan diterima dimuka	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban pajak	163.400.982,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk panjang jt tempo	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk pendek lainnya	0,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	3.968.753.320,89
Arus Kas dari aktivitas investasi	
penurunan (kenaikan) investasi jangka panjang	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(15.753.578.711,35)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap dalam penyelesaian	1.735.366.250,00
penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	240.289.759,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi	(13.777.922.702,35)
Arus Kas dari aktivitas pendanaan	
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang	0,00
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang lainnya	229.793.589,00
kenaikan (penurunan) ekuitas	8.519.015.518,35
kenaikan (penurunan) selisaih penilaian kembali aktiva tetap	0,00
kenaikan (penurunan) cadangan	(43.104.402,00)
pembagian laba	76.564.566,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan	8.782.269.271,35

Lampiran 8

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	22.850.906,43
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.158.857.406,63
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.181.708.313,06

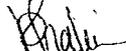
Diperiksa Oleh
Kasje Keuangan,



HJ.KARTINI KAI DATI,SE

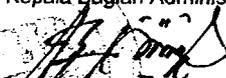
Temate, 5 Maret 2016

Disusun Oleh
Kasubi Pembukuan,



ROSDIANA HALIM,SE

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Bagian Administrasi,



ABDUL GANI HATARI,SE



Lampiran 8



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TERNATE
JL. Batu Angus No.10

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2015
LAPORAN KONSOLIDASI

Arus Kas dari aktivitas operasi	
laba sebelum pajak dan pos luar biasa	(2.742.238.006,46)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(94.846.675,00)
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - penyusutan	7.012.217.695,75
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - amortisasi	243.031.157,56
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - peyisihan piutang	0,00
- beban bunga	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang usaha	(1.069.636.076,81)
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang lain-lain	1.400.000,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - persediaan	22.618.271,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - pembayaran dimuka	(93.500.000,00)
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban usaha	550.372.770,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban non usaha	27.477.000,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - beban ymh dibayar	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - pendapatan diterima dimuka	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban pajak	669.922.961,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk panjang jt tempo	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk pendek lainnya	0,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	4.526.819.097,04
Arus Kas dari aktivitas investasi	
penurunan (kenaikan) investasi jangka panjang	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(27.463.594.793,17)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap dalam penyelesaian	31.089.300,00
penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	1.871.169.088,39
Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi	(25.561.336.404,78)
Arus Kas dari aktivitas pendanaan	
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang	0,00
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang lainnya	(230.704.614,00)
kenaikan (penurunan) ekuitas	21.790.310.301,17
kenaikan (penurunan) selisaih penilaian kembali aktiva tetap	0,00
kenaikan (penurunan) cadangan	0,00
pembagian laba	(502.237.473,00)
Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan	21.057.368.214,17

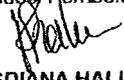
Lampiran 8

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(1.026.900.110,11)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.185.757.516,70
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.158.857.406,59

Diperiksa Oleh
Kasie Keuangan,

H.J. ARFA M. DUN, SE

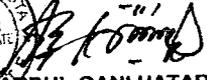
Ternate, 5 Maret 2014

Disusun Oleh
Kasubji Pembukuan,


ROSDIANA HALIM, SE

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Bagian Administrasi,




ABDUL GANI HATARI, SE



Lampiran 9.

Nilai Akun Elemen Indikator Kinerja Keuangan (2014-2015)

No.	Nama Akun	2014	2015
1	Laba Sebelum Pajak	240.597.197.27	(2.742.238.006.46)
2	Aktiva Produktif	48.169.019.507.24	69.689.967.240.58
3	Penjualan	38.098.385.958.00	41.193.016.275.00
4	Penjualan Air	34.086.142.858.00	37.339.855.750.00
5	Biaya Operasional	25.852.864.191.45	27.603.302.024.02
6	Penagihan Air	7.210.736.050.00	8.249.456.355.00
7	Piutang Usaha	7.446.106.544.69	8.514.342.621.30
8	Penjualan per Hari	104.379.139.61	112.857.578.84
9	Aktiva Lancar	11.862.441.112.45	12.837.165.037.38
10	Kewajiban Jangka Pendek	14.606.914.217.05	15.854.686.948.05
11	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
12	Ekuitas	35.611.927.434.21	54.157.762.255.96
13	Total Kewajiban	15.062.520.808.05	16.079.588.925.05
14	Total Aktiva	50.674.448.242.26	70.237.351.181.01
15	Laba Operasi sebelum Penyusutan	3.968.753.320.89	4.526.819.097.04
16	Pelunasan Kewajiban	15.062.520.808.05	16.079.588.925.05

Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

$$= \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{240.597.197,27}{48.169.019.507,24} \times 100\%$$

$$= 0.04 \%$$

$$2015 = \frac{(2.742.238.006,46)}{69.689.967.240,58} \times 100\%$$

$$= -0.03 \%$$

2. Rasio Laba terhadap Penjualan

$$= \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{240.597.197,27}{38.098.385.958,00} \times 100\%$$

$$= 0.06 \%$$

$$2015 = \frac{(2.742.238.006,46)}{41.193.016.275,00} \times 100\%$$

$$= -0.06 \%$$

3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar

$$= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{11.862.441.112,45}{14.606.914.217,05} \times 100\%$$

$$= 0.81 \%$$

$$2015 = \frac{12.837.165.037,38}{15.854.686.948,05} \times 100\%$$

$$= 0.80 \%$$

4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas

$$= \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{0}{35.611.927.434.21} \times 100\%$$

$$= 0.00 \%$$

$$2015 = \frac{0}{54.157.762.255.96} \times 100\%$$

$$= 0.00 \%$$

5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang

$$= \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{50.674.448.242.26}{15.062.520.808.05} \times 100\%$$

$$= 3.36 \%$$

$$2015 = \frac{70.237.351.181.01}{16.079.588.925.05} \times 100\%$$

$$= 4.36 \%$$

6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi

$$= \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{25.852.864.191.45}{38.098.385.958.00} \times 100\%$$

$$= 0.67 \%$$

$$2015 = \frac{27.603.302.024.02}{41.193.016.275.00} \times 100\%$$

$$= 0.67 \%$$

7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga

Jatuh Tempo

$$= \frac{\text{Laba Operasi sebelum biaya penyusutan}}{\text{Angsuran pokok dan bunga jatuh tempo}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{3.968.753.320.89}{15.062.520.808.05} \times 100\%$$

$$= 0.26 \%$$

$$2015 = \frac{4.526.819.097.04}{16.079.588.925.05} \times 100\%$$

$$= 0.28 \%$$

8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air

$$= \frac{\text{Aktiva Produktif}}{\text{Penjualan (Pendapatan Operasional)}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{48.169.019.507.24}{38.098.385.958.00} \times 100\%$$

$$= 1.26 \%$$

$$2015 = \frac{69.689.967.240.58}{41.193.016.275.00} \times 100\%$$

$$= 1.69 \%$$

9. Jangka Waktu Penagihan Piutang

$$= \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Jumlah Penjualan perhari}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{7.446.106.544.69}{104.379.139.61} \times 100\%$$

$$= 71.33 \%$$

$$2015 = \frac{8.514.342.621.30}{112.857.578.84} \times 100\%$$

$$= 75.44 \%$$

10. Efektivitas Penagihan

$$= \frac{\text{Rekening Tertagih}}{\text{Penjualan Air}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{7.210.736.050.00}{34.086.142.858.00} \times 100\%$$

$$= 0.21 \%$$

$$2015 = \frac{8.249.456.355.00}{37.339.855.750.00} \times 100\%$$

$$= 0.22 \%$$

